



Newsletter

# Interfidei

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia

## Daftar Isi

Editorial .....	1
Fokus .....	3
Opini .....	8
Potret .....	16
Feature.....	23
Refleksi .....	28
Aktivitas .....	31

## EDITORIAL



AGAMA, POLITICS DAN  
POLITICKING

RELIGION, POLITICS, AND  
POLITICKING

Penanggung Jawab  
Elga Sarapung  
Pemimpin Redaksi  
Indro Suprobo  
Tim Redaksi  
Khairul Anwar, Frans Lambut,  
Margaret, Indro Suprobo  
Setting/ Layout  
Sarnuji  
Dokumentasi  
Margaret Aritonang  
Keuangan  
Eko Putro Mardiyanto  
Sekretariat  
Ira Sasmita  
Distributor  
Susanto  
Diterbitkan oleh  
Institut DIAN/ Interfidei  
Jl. Banteng Utama 59,  
Perum Banteng Baru  
Yogyakarta, 55581, Indonesia.  
Phone.:0274-880149. Fax.:0274-  
887864  
E-mail  
dianinterfidei@yahoo.com  
Website  
Http://www.interfidei.or.id.

**K**ETERLIBATAN agama-agama dalam politik merupakan sebuah kewajiban sekaligus panggilan mendasar, karena melalui keterlibatan semacam itulah agama-agama mengupayakan terwujudnya akhlak yang paling menentukan bertahannya suatu bangsa, yakni keadilan. Keadilan adalah prinsip hukum seluruh jagad raya di mana pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran hukum kosmis, dan dosa ketidakadilan berimplikasi pada hancurnya tatanan masyarakat manusia, baik itu manusia yang secara formal beragama maupun yang tidak beragama.<sup>1</sup> Akhlak keadilan yang hendak dicapai melalui politik itu

**R**ELIGION'S involvement in politics is obligatory as well as a basic calling through which a nation's morality, especially regarding justice, can be upheld. Justice is the principle law of the universe thus violation of it is violation of the cosmic law, and injustice will result in ruining the social arrangement of those who formally and informally embrace religions.<sup>1</sup> To achieve justice through politics is so essential that Ibn Taymiyyah postulated a well-known statement for all religious group "The world endures justice and infidelity, but it doesn't endure oppression in Islam". This statement

<sup>1</sup>.Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, 1995, pg.174

sangatlah mendasar sehingga Ibn Taymiyyah mengemukakan sebuah ungkapan yang terkenal dan mendasar untuk diperhatikan oleh semua agama, “*Dunia bertahan bersama keadilan dan kekafiran, tetapi tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam*”. Pernyataan ini menegaskan bahwa semua agama dipanggil untuk terlibat dalam politik sebagai salah satu jalan menegakkan keadilan.

Namun demikian, dalam upaya ini, agama-agama semestinya tetap melakukan *discretio* atau cermat terhadap motivasi-motivasi dirinya agar senantiasa sadar dan bertahan dalam aras *politics*, serta tidak lupa diri sehingga tergelincir dalam *politicking*. *Politics* memang lebih berkait dengan ilmu pengetahuan dan praksis tentang bagaimana mengatur kehidupan sosial manusia, terutama berkaitan dengan masalah kekuasaan dan pemerintahan. Di dalamnya terdapat penentuan sikap dalam memilih paham atau ideologi yang secara sungguh-sungguh akan dilaksanakan dalam masyarakat untuk mewujudkan akhlak keadilan. Sementara *politicking* lebih mengarah kepada permainan politik, “ngakali” atau “membodohi” orang lain atau masyarakat dalam rangka perebutan kekuasaan.<sup>2</sup>

Dalam kerangka itu, pendidikan politik sebagai upaya saling belajar dan saling mencerdaskan di antara umat beragama, merupakan proses penting yang harus selalu digerakkan agar agama-agama dan umat beragama senantiasa sensitif terhadap gelagat ketidakadilan yang muncul di masyarakat. Khususnya, dalam konteks pemilu legislatif dan presiden yang sedang dihadapi ini, umat beragama sungguh dapat melakukan pilihan secara cerdas. Sementara, umat beragama yang terpilih, juga memiliki sensitivitas yang kuat terhadap rasa keadilan sehingga tidak memperkaya diri dengan beragam kemewahan, melakukan korupsi, menyalahgunakan uang rakyat hanya untuk rapat, serta tidak peduli kepada masyarakat yang terancam kehilangan harkat dan martabat oleh karena pemiskinan, peminggiran, pelanggaran HAM, dan pengabaian.[]

**“Dunia bertahan bersama Keadilan dan Kekafiran, tetapi tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam”**

**(Ibnu Taymiyyah)**

clarifies that all religions are invited to be involved in politics as a way to endorse justice.

However, it is necessary for religions to be *discretio* or to be careful about motivations that they are aware of and stand firm in politics and not lose control to avoid the trap of *politicking*. Politics is closely related to knowledge and praxis on managing social life, especially with power and government. It determines attitudes in choosing perspectives and ideologies to promote justice. *Politicking*, on the other hand, is more of a political game; it deceives people for the sake of power.<sup>2</sup>

Therefore, political education as medium to learn from each other between religious communities is very important to enable people to be sensitive to potential injustices within the society. In relation to the legislative and presidential election that are currently taking place, religious communities can have the chance to vote smartly. The elected representatives, who are also part of religious communities, will be so strongly sensitive to justice that they will not merely enrich themselves through corruption, waste people's money to organize 'meetings', and ignore those who are threatened losing their human dignity due to poverty, marginalization, human rights violations, and ignorance.[]

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kema-nusiaan*, Paramadina, 1995, hlm.174

<sup>2</sup> Agus Edi Santosa, Ed, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda*, Mizan, 1993, hlm.172-175

<sup>2</sup> Agus Edi Santosa, Ed, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda*, Misan, 1993, pg.172-175

PEMILU 2009 DAN PROSPEK PLURALISME AGAMA  
DI INDONESIA

Herry Metty

**K**ITA telah memasuki babak penting dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Pesta demokrasi telah dan sedang kita rayakan, yakni pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden. Pemilu legislatif sudah kita lewati; ada sejuta harapan untuk perbaikan bangsa ini ke depan, teristimewa memperbaiki lagi kesatuan dalam keragaman (*unity in diversities*) kita yang sedang terluka akibat berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini mencederai identitas kebangsaan kita sebagai bangsa yang majemuk dan multikultur. Ada 34 Partai Politik di tingkat nasional, baik yang berlandaskan nasionalis maupun agamis yang akan bertarung dalam Pemilu 2009 ini, di samping 6 Partai Lokal di Aceh. Dalam hingar-bingar perpolitikan nasional kita saat ini, masing-masing partai politik menawarkan janji-janji perubahan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Kita berharap, melalui pemilu ini akan tercipta masyarakat majemuk yang humanis, adil dan demokratis.

Di tengah-tengah harapan di atas, ada juga kecemasan tentang prospek pluralisme dan multikulturalisme, khususnya tentang hak atas kebebasan beragama dan atau berkeyakinan. Kecemasan ini muncul tentu saja beralasan, bila kita sedikit melihat fenomena yang terjadi selama ini. Misalnya, beberapa waktu yang lalu banyak muncul gerakan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, munculnya perdebatan, ketegangan dan perbedaan pandangan berkaitan dengan lahirnya peraturan daerah dan perundang-undangan negara yang "agamis" (lahirnya perda-perda syariat dan perda injili) dan politisasi agama menjelang pemilu ini. SETARA Institute mencatat bahwa sepanjang tahun 2008, terjadi 367 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Dari 367 tindakan pelanggaran tersebut, terdapat 188 tindakan pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui tindakan aktif (*by commission*), maupun melalui tindakan pembiaran (*by omission*) serta terdapat 88 tindakan pelanggaran berupa kriminal dan sejumlah 91 tindakan pelanggaran berupa tindakan intoleransi yang dilakukan oleh warga masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok. Selama tahun 2008, yang paling

GENERAL ELECTION 2009 AND THE PROSPECT OF  
RELIGIOUS PLURALISM IN INDONESIA

By Herry Metty

**W**E have entered a significant stage in the history of our nation, the celebration of democracy through legislative and presidential elections. There are thousands of hopes for better future particularly in improving unity of diversities in Indonesia which has been injured by incidents that torn her identity as a plural and multicultural nation. There are 34 national political parties in addition to six local parties in Aceh, which are based on nationalism as well as religious values, involve in the general election in 2009. Amidst the celebration, each of the parties promises a change and a better future for Indonesia. People hope for a humanitarian, just, and democratic plural society in Indonesia.

Beside hopes of the people for the election, there are also doubts of the future of pluralism and multiculturalism in Indonesia especially on religious rights and freedom. Such doubts are because of the many movements and violence in the name of religions these days, arguments and tension because of different opinions on "religious" regional and national laws (*syariah* and *injili* laws), as well as politicization of religions in welcoming the election. SETARA Institute notes there are 367 violations on religious freedom through 265 incidents in 2008. There are 188 of the violations that involve the state as the perpetrator both by commission and by omission, and 91 violations by intolerant attitudes of the people individually as well as collectively. During 2008, it is noted that Jemaat Ahmadiyah suffered violation a lot more than other groups. There are 238 violations on Jemaat Ahmadiyah, 48 on

Situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan ini kian suram karena gagal mendapatkan pengakuan yang utuh dari negara akibat bias tafsir konstitusional yang tetap tidak dipedulikan oleh lembaga negara dan para elit politik negara ini.

banyak menjadi korban tindak pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah Jemaat Ahmadiyah. Ada 238 tindakan pelanggaran dilakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah, terhadap individu ada 48 tindakan pelanggaran, terhadap aliran keagamaan atau keyakinan lain, ada 15 dan terhadap Umat Kristen, ada 15 tindakan pelanggaran. Berbagai tindakan pelanggaran tersebut terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain tindakan intoleransi, represi negara, pembiaran negara dan tindakan kriminal oleh warga negara atau kelompok masyarakat terhadap individu atau kelompok agama atau aliran kepercayaan yang lain.<sup>1</sup>

Situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan ini kian suram karena gagal mendapatkan pengakuan yang utuh dari negara akibat bias tafsir konstitusional yang tetap tidak dipedulikan oleh lembaga negara dan para elit politik negara ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah perundang-undangan dan peraturan yang bersifat restriktif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Misalnya, Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pornografi dengan landasan moralitas agama, Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembatasan Ahmadiyah, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Larangan Ahmadiyah, Rekomendasi Wali Kota Padang 20 November 2008 Tentang Pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah di Kota Padang, PERDA Syariah di Bulukumba, Sulawesi Selatan dan masih banyak peraturan daerah yang muncul di daerah lain, termasuk yang bersifat reaktif, atau semacam tindakan "counter attack" karena ketidakpuasan dari daerah lain seperti munculnya wacana PERDA Injil di Manokwari, Papua Barat. Walaupun sudah ada jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, namun masih ada bias tafsir yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan ini; karena pada saat yang sama, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman ala Orde Baru dengan dalih penistaan dan penodaan agama.

Fenomena yang mencemaskan di atas, tentu saja bisa kita lihat lebih jauh menjelang dan setelah pemilu nanti. Jika situasinya tetap seperti di atas, maka bukan tidak mungkin kita akan menghadapi babak yang sulit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika konstelasi politik identitas dan praktek politik sektarian atas nama agama di atas tetap bertahan. Tentu saja kita dapat membayangkan,

individuals, 15 on other religious groups. Those violations are in many forms from intolerance, repression by the state, omission by the state, to crimes by citizens or groups toward individuals and religious groups.<sup>1</sup>

Religious freedom in Indonesia is worsen for the failure to achieve full admission from the state as a result of constitutional bias interpretation that is ignored by the state's institutions and political elites in this country. This is obviously reflected through many restrictive laws nationally and regionally, take the example of the Law No. 48, 2008, on Pornography which is based on religious morality, Joint Ministerial Decree No.3, 2008, on restrictions for Ahmadiyah, decision letter of the governor of South Sumatra on the prohibition of Ahmadiyah, recommendation letter of the major of Padang on 20 November 2008 on the prohibition of Ahmadiyah and bringing down Ahmadiyah's billboard in Padang, Syariah regional law in Bulukumba, South Sulawesi, and many other regional laws at different regions in Indonesia which are reactive and also an act of "counter attack" as a form of dissatisfaction of other regions like PERDA Injil in Manokwari, West Papua. Even though religious freedom is guaranteed by UUD 1945 chapter 29 verse 2, there are still bias interpretation by the state in protecting religious rights because at the same time the state establishes policies that legalize uniformity, as it was during the New Order, on the behalf of religious blasphemy.

**Politisasi agama ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi di tingkat daerah. Akibatnya, pendidikan politik bagi masyarakat menjadi mandul dan masyarakat digiring kepada gaya berpolitik sektarian menurut skenario elit politik dan elit negara.**

The uncertainties will be clear after the election later. If there isn't any changes after the election and the politic of identity as well as sectarian political practices in the name of

<sup>1</sup>.Bdk. Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008, "Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia" (Jakarta: Setara Institute, Januari 2009). Laporan lengkap dapat dibaca di <http://www.setara-institute.org/category/kategori/laporan>.

<sup>1</sup>.Based on Report on Religious Freedom in Indonesia in 2008 "Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia" (Jakarta: Setara Institute, January 2009). The complete report is accessible at <http://www.setara-institute.org/category/kategori/laporan>

apa yang akan terjadi di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif kita. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan, karena di saat yang sama, di satu pihak kita merayakan pesta demokrasi untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dengan prinsip hak dan kewajiban yang sama, setara dan adil sebagai warga negara demi kesejahteraan bersama, tetapi di lain pihak, muncul semangat ideologi politik sektarian, terlebih akhir-akhir ini yang paling banyak muncul adalah politik sektarian atas nama agama dan sedikit bersifat kedaerahan yang berpotensi melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan. Politik identitas atas nama agama tersebut, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai merambah ke dalam ranah publik gelandangan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sampai pada lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lembaga negara, elit negara dan beberapa partai politik dan elitnya telah dan terus melakukan politisasi agama. Masing-masing berjuang bagaimana memoles citranya demi meraih dukungan suara pemilih dan agama dieksploitasi sebagai isu yang dapat menguntungkan secara politis. Politisasi agama ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi di tingkat daerah. Akibatnya, pendidikan politik bagi masyarakat menjadi mandul dan masyarakat digiring kepada gaya berpolitik sektarian menurut skenario elit politik dan elit negara. Dikotomi mayoritas versus minoritas ini, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang tetap dilanggengkan dan sering dipakai oleh elit politik, elit agama dan elit negara sebagai jurus yang paling ampuh untuk meraih dan mempertahankan kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Implikasinya adalah praktek demokrasi hanya dijalankan sebatas "demokrasi prosedural", tanpa menyentuh aspek substansial dari demokrasi itu sendiri. Dalam bidang legislatif, terlihat jelas dengan keluarnya beberapa peraturan dan perundang-undangan yang sama sekali tidak mengakomodasi konsep dan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang menjadi jati diri ke-indonesia-an kita yang sudah disepakati sejak awal berdirinya bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan dari entitas kebangsaan yang beraneka ragam. Ada beberapa proses legislasi yang sudah dan sedang mengarah ke sana, misalnya UU No. 48 Tahun 2008 Tentang Pornografi, SKB Tentang Pembatasan Ahmadiyah, SKB Tentang Kerukunan Antarumat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dan masih banyak lagi rancangan produk undang-undang dan peraturan yang sangat sektarian dan diskriminatif yang akan menyusul nanti baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya tentang kesehatan, tentang pemakaman dan lain sebagainya. Lebih mengerikan jika demokrasi yang dijalankan hanya sekedar demokrasi prosedural, "yang penting suara mayoritas setuju...". Dalam bidang yudikatif, jelas akan ada keterkaitan

religions still go on, we will face a difficult phase as a nation. We can predict what might happen in our legislative, executive, and judicative institutions. This is of course a sad contradiction because on one side we celebrate democracy to open space as wide as possible for all of the people to participate in the government on the principles of equal rights and obligations as well as justice, but on the other side sectarian political practices emerge everywhere particularly on the behalf of religions and some are also of particular regions that are potential to produce discrimination and injustice. The politic of identity in the name of religions has spread to public spaces lately and even to the state's institutions: executive, legislative, and judicative. The state's institutions, elites, and some political parties and their elites have been politicising religions. They try hard to camouflage their identities to gain support, and benefit from manipulating religions. Politicization of religions takes place not only nationally but also regionally. As the result, political education for the people malfunctions and people are controlled to sectarian political attitude according to political or the state's elites. The dichotomy of majority versus minority has been on stage since the New Order era until now and frequently utilized by political elites, religious elites, and the state's elites as powerful weapon to maintain economic and power interests.

This implies democracy as merely "procedural democracy" without even touching substantial aspects of

**Perselingkuhan masif antara elit negara, elit politik dan elit agama ini, ujung-ujungnya bermuara pada satu tujuan yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan.**

democracy itself. Under the light of legislative institution, it is clearly reflected through the establishment of rules and laws that completely do not accommodate the concepts and values of pluralism and multiculturalism which have become the identity of the nation since the beginning of Indonesia as a nation of various entities. There have been some legislative processes that are heading to this direction, for instance the law No. 48, 2008, on Pornography, SKB on Restrictions for Ahmadiyah, SKB on Interfaith harmony and building worship place, and still many plans on producing other sectarian and discriminative laws nationally and regionally on health, burial ceremony, etc. It is even worse as people are conducting procedural democracy, "agreed by majority groups as the key

antara kedua lembaga lain, misalnya dengan legislatif. Logikanya adalah, jika apa yang sudah diputuskan dalam proses legislasi melalui lembaga legislatif, maka yudikatif perlu menopang demi jalan dan tegaknya peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan di lembaga legislatif. Dalam bidang eksekutif, tetap ada kecenderungan yang sangat kuat untuk memanfaatkan situasi atau sentimen sektarianisme di atas sehingga kebijakan publik yang dibuat sarat dengan kepentingan pragmatis dan jauh dari rasa keadilan sosial. Perselingkuhan masif antara elit negara, elit politik dan elit agama ini, ujung-ujungnya bermuara pada satu tujuan yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Menilik situasi di atas sambil berefleksi terhadap realitas aktual perpolitikan kita saat ini, kita menemukan bahwa selama ini term "mayoritas" dan "minoritas" merupakan bahasa penguasa yang dikonstruksi sedemikian rupa secara sistemik untuk melanggengkan ketidakadilan struktural yang memarginalisasi sebagian dari anak bangsa sendiri yang menjadi tumbal dan korban dari politik sektarianisme. Siklus ketidakadilan struktural ini di satu sisi menjadi misi yang selalu diobral-obral untuk diperjuangkan dalam setiap janji kampanye dan draft kebijakan publik yang dibuat, tetapi di sisi lain, siklus ketidakadilan struktural ini dijadikan sebagai lahan politik menjanjikan untuk digarap guna merebut kekuasaan. Sentimen mayoritas versus minoritas sebagai sebuah budaya berpolitik yang dipertontonkan selama ini, tidak hanya menyangkut agama tetapi juga merasuk dalam suku, ras dan antargolongan.

Menurut William Chang, ada tiga mayoritas utama yang menentukan perpolitikan kita, yakni mayoritas rasial, mayoritas agama dan mayoritas modal.<sup>2</sup> Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih kuat didominasi oleh pertimbangan rasial, agama dan uang. Seringkali isu agama dipakai untuk menutupi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Demi uang dan kekuasaan seorang politisi bisa menggantikan agamanya dengan agama mayoritas dari masyarakat satu entitas politis. Pejabat agama dijerat dengan cara-cara yang sangat halus, untuk kemudian dipakai demi melindungi kepentingan ekonomi dan kekuasaan sejumlah kecil orang. Pola berpolitik seperti ini menunjukkan secara jelas bahwa kelompok yang kaya, yang dipercaya dalam lingkungan agama mayoritas dan cerdik memanfaatkan situasi ini memiliki pengaruh yang besar dan dapat mengendalikan peta perpolitikan bangsa ini. Pola dan praktek politik seperti ini memacu para politisi dan partai politik berlomba-lomba untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa

**Nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang mengikat semua orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya, ditekankan sebagai inti dan tujuan dari sebuah perjuangan politis.**

point". There will be obvious relation between the other two institutions in judicative field. Logically, a decision of legislative process by legislative institution will be supported by judicative board. In the executive board, there is still strong tendency to exploit the situation or sectarian sentiments that public policy established laden with pragmatic interests and far beyond social justice. This massive affair between the state's elites, political and religious elites will end at one aim that is to conquer and maintain power.

Departing from the situation explained above while reflecting actual reality of political life around us, we can see that the terms "majority" and "minority" are authoritarian terms which are constructed systemically to preserve structural injustice that marginalize some people for the sake of sectarian politics. The cycle of this structural injustice, on one side, has always been a mission to sell out for political campaign and a draft for public policy to establish, but on the other side it is also a promising political land to work on for power. The bias of majority versus minority as a culture of politic doesn't only relate to religions but also race and groups.

According to William Chang, there are three majority groups that determine political life in Indonesia, majority of race, of religion, and of capital.<sup>2</sup> This implies that politic in Indonesia is still strongly dominated by racial and religious judgments as well as money. Religious issues are often abused to cover up economic interests and power. A politician is even willing to convert for money and power. Religious officials are trapped to protect economic interests and power of certain groups. This clearly illustrates that the prosperous groups who are trusted in majority environment are greatly influential and able to control the political map in Indonesia. This attitude toward politic stimulate politicians and political parties to struggle only for their groups without considering the others. This is of course in

<sup>2</sup>. Lih. William Chang, "Makna Kesatuan dalam Keragaman", dalam Piet Go, dkk., *Etos dan Moralitas Politik, Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 141-145.

<sup>2</sup>. See William Chang, "Makna Kesatuan dalam Keberagaman", in Piet Go, and friends. *Etos dan Moralitas Politik, Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), pg. 141-145.

mempedulikan kepentingan seluruh bangsa, walaupun dengan jargon-jargon yang diteriakkan demi kepentingan rakyat.

Situasi dan pola perpolitikan di atas menjadi salah satu faktor penyebab mengapa kita sulit keluar dari berbagai krisis yang melanda kita dan harapan untuk menggapai cita-cita bangsa demi kesejahteraan bersama yang berlandaskan keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi dan ketuhanan, makin jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, dalam konteks bangsa Indonesia yang multikultur dan plural, kita perlu membangun paradigma berpolitik yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan budaya berpolitik yang berwajah humanis, berorientasi pada martabat manusia yang melampaui batas agama dan ras. Nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang mengikat semua orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya, ditekankan sebagai inti dan tujuan dari sebuah perjuangan politis. Untuk mewujudkan terbentuknya sebuah politik yang berwajah humanis, diperlukan sebuah jaringan politis lintas budaya dan lintas agama, karena hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan sebuah kondisi baru yang lebih memungkinkan relasi yang demokratis dan adil antara sesama anak bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional.<sup>3</sup>

Kebutuhan akan sistem politik dan politisi yang berwajah kemanusiaan di atas menuntut kita untuk menggunakan hak politik kita secara bertanggung jawab. Kita perlu memilih wakil-wakil kita yang sungguh mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika demikian, maka partai-partai politik dan para politisi di negeri ini tidak akan menggunakan secara picik argumentasi agama, dan tidak akan mempermainkan agama demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Akhirnya, agama juga tidak lagi menjadi tujuan politis dari partai atau politisi tersebut, melainkan harkat dan martabat manusia yang menjadi orientasi dan tujuan dari politik itu sendiri.[]

 01 Partai Hanura Rakyat (HANURA)	 02 Partai Karya Pekerja Bangsa (PKPB)	 03 Partai Pergerakan Sin Politerya Indonesia (PPSI)	 04 Partai Politik Rakyat Nasional (PPRR)	 05 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)	 06 Partai Barisan Nasional (PABNAS)	 07 Partai Keadilan dan Perubahan Indonesia (PKPI)	 08 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	 09 Partai Amanat Nasional (PAN)
 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PER)	 11 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	 12 Partai Persatuan Dewasa (PED)	 13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	 14 Partai Pergerakan Indonesia (PPI)	 15 Partai Nasional Indonesia (PNI)	 16 Partai Demokrasi Pembangunan (PDP)	 17 Partai Karya Pembangunan (PKP)	 18 Partai Mahasiswa Bangsa (PMB)
 19 Partai Pergerakan Demokrasi Indonesia (PDI)	 20 Partai Demokrasi Keadilan (PDK)	 21 Partai Republik Indonesia (PRI)	 22 Partai Pelajar (PP)	 23 Partai Gerakan Keadilan (GUK)	 24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	 25 Partai Demokrasi (PD)	 26 Partai Nasional Berkeadilan (PNB)	 27 Partai Bulan Bintang (PBB)
 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	 29 Partai Solidaritas Reformasi (PBB)	 30 Partai Politik (Poli)	 31 Partai Demokrat (PD)	 32 Partai Keadilan Demokrasi Indonesia (PKDI)	 33 Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	 34 Partai Keadilan Nasional Utama (PKNU)	<b>Peserta Partai Politik 2009</b>	

contradiction to the fact where most of them presenting themselves concern for the people.

Political practices in Indonesia, as explained above, is one of the causes why it is so difficult for us to solve the crisis and to achieve social justice, humanism, democracy and divinity is still far from real. For this reason, under the context of Indonesia as a multicultural and plural nation, we need to build political paradigm that focuses on humanitarian values, humanity-based political culture, human's dignity beyond religion and race. Universal humanitarian values which binds all people from any backgrounds of faith and culture, is emphasised as the core and aim of political struggle. To build humanistic politic needs cross-religious and cultural political network because this is the only way to create a new condition that is open for democratic and fair relation among all Indonesians locally and nationally.<sup>3</sup>

The need for a humanitarian political system and politicians demand us to use our political rights properly. We must elect our representatives who are truly committed to humanitarian values. If all individuals realize this responsibility, there will be no longer political parties that induce religious reasons and manipulate religions for power. Finally, religions will not be political target of parties or politicians. It is the dignity of human beings as the orientation and the aim of politic.[]

<sup>3</sup> Bdk. Budi Kleden, *Kampaung Bangsa Dunia, 50 Tahun Nusa Tenggara Timur* (Yogyakarta: Lamalera, 2008), hlm. 119-124.

<sup>3</sup> Budi Kleden, *Kampaung Bangsa Dunia, 50 Tahun Nusa Tenggara Timur* (Yogyakarta: Lamalera, 2008), pg. 119-124.

## MANDAT AGAMA DALAM PENDIDIKAN POLITIK

INDRO SUPROBO

*"Bangsa yang cerdas hidupnya akan mudah bersikap demokratis dan mempertahankan demokrasi, sebab totaliterisme hanya dapat berjalan di atas kebodohan (atau frustrasi) massa. Bangsa yang tidak dibuat cerdas sangat mudah dijadikan kuli, jongsos atau babu dan sangat gampang dieksploitasi, bahkan mengkonsolidasi eksploitasi terhadap dirinya sendiri. Bangsa yang cerdas mudah memerdekakan diri dari segala bentuk belenggu dan akan memperteguh kemerdekaan kepada bangsa lain juga"*

YB. Mangunwijaya, dalam Reformasi Politik, Kebangkitan Agama dan Konsumerisme, hlm.28

SAMPAI dengan bulan Juli 2009 ini, warga negara Indonesia disibukkan oleh perhelatan politik berupa Pemilihan Umum Legislatif pada bulan April dan Pemilihan Presiden pada bulan Juli. Ini merupakan peristiwa yang penting meskipun perlu tetap diperlakukan sebagai sebuah peristiwa yang biasa dan lumrah sebagaimana dinyatakan oleh pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Purwo Santoso PhD. Sikap masyarakat yang memperlakukan pemilihan umum sebagai peristiwa yang biasa dan lumrah, meskipun memiliki nilai penting, merupakan petunjuk dari kedewasaan dalam berpolitik.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat dalam gejala tidak dimanfaatkannya kesempatan pemilu untuk ugul-ugalan atas nama "pesta demokrasi".

## KONTEKS YANG MENANTANG

Mekanisme pemilu 2009 ini berbeda dari mekanisme pemilu 2004, di mana warga masyarakat tidak lagi memilih partai yang akan menentukan calon-calon wakilnya dalam lembaga legislatif di tingkat pusat maupun daerah, melainkan secara langsung memilih seorang calon legislatif dari suatu partai baik untuk tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten atau kota. Mekanisme ini membuat suasana persaingan antar calon legislatif, bahkan dalam partai yang sama, menjadi semakin terasa. Para pengamat politik memperkirakan bahwa praktik *vote buying*<sup>2</sup> (pembelian suara) masih tetap menjadi kemungkinan yang mencemaskan.

<sup>1</sup>. Lih. Pemilu Rumit, Kedaulatan Rakyat, Rabu, 1 April 2009, kolom Analisis.

<sup>2</sup>. Istilah *vote buying* diperkenalkan oleh Purwo Santoso, PhD, sebagai istilah pengganti yang lebih tepat daripada istilah *money politics*.

## THE RELIGIOUS MANDATE IN POLITICAL EDUCATION

Indro Suprobo

*"People of an intelligent nation will be easily democratic and will defend democracy since totalitarianism can only be possible with mass illiteracy (or frustration). Abandoned people who are engineered to be unintelligent are easily used as coolies or underpaid labors and are easily exploited; even consolidate the very exploitation against their life. An intelligent nation will easily free themselves from any forms of subjugation and will promote the same freedom of the other nations."*

YB. Mangunwijaya, *Reformasi Politik, Kebangkitan Agama dan Konsumerisme* (Political Reform, Religious Revivalism, and Consumerism), p.28

Up to July 2009, Indonesian people will be busy of celebrating two political events of the MP Election in April and Presidential Election next July. These are important events in the democratic process although people see them as ordinary practices, as noticed by Purwo Santoso Ph.D, a lecturer in political studies at Yogyakarta's Gadjah Mada University. The people's perception of the Elections as ordinary events, in spite of their actual significance in the whole process of democracy, is a signal of the Indonesian people's maturity in doing politics.<sup>1</sup> This is noticeable from the absence of extravagant practices during the Elections done in the name of "a feast of democracy".

## The challenging contexts

The mechanism of the 2009 Elections is different from that of 2004, in which people no longer vote a political party who will represent them in both regional and national parliaments but people vote a candidate proposed by political parties for each level of parliament. This has driven to a tighter competition among the candidate, even from the same political party. Political analysts predicted that vote buying<sup>2</sup> would become a worrying practice in the Elections.

The practice of vote buying can be obviously seen in village communities in rural areas, into which the MP candidates did the socialization of their candidature. One of the most common models of the practice was done this way: candidate either come to the routine meeting held by the

<sup>1</sup>. See "Pemilu Rumit" (A Complicated Election), *Kedaulatan Rakyat*, April 1 2009.

<sup>2</sup>. The term *vote buying* was introduced by Purwo Santoso, PhD as a more accurate term in place of *money politics*.



Praktik vote buying ini di antaranya dapat dijumpai di komunitas-komunitas desa, di mana para calon legislatif menjalankan sosialisasi pencalonan dirinya untuk menjadi anggota legislatif dari partai tertentu. Salah satu model yang umum dari vote buying ini adalah para calon legislatif ini mendatangi komunitas-komunitas desa, menyelenggarakan pertemuan warga dan membiayai seluruh keperluan pertemuan itu, memberikan sejumlah uang kepada komunitas warga, dan meminta agar warga setempat memilihnya pada saat pemilu nanti. Pada saat pertemuan itu, calon legislatif ini mengedarkan daftar presensi atau daftar nama pendukung disertai tanda tangan masing-masing. Bagi warga desa pada umumnya, tidak mengisi daftar hadir dan tidak menandatangani edaran dukungan itu dalam suasana publik (di hadapan umum), seringkali merupakan hal yang tidak mengenakan, sehingga mau tidak mau ia harus mengisi dan menandatangani daftar dukungan tersebut. Yang paling tidak mengenakan bagi warga desa adalah ketika pada akhir pertemuan, sang calon legislatif atau salah seorang tim suksesnya mengajukan pertanyaan kepada semua warga tentang kesanggupan untuk sungguh-sungguh memilih calon legislatif yang bersangkutan, dan harus dijawab secara terbuka pula dalam forum tersebut, dengan disertai pernyataan bahwa Allah menyaksikan pernyataan warga tersebut dan bahwa Allah mencatat orang-orang yang nantinya akan berbohong. Ini hanyalah salah satu model. Tentu saja ada banyak model yang lain. Ini merupakan tantangan pertama.

Tantangan kedua yang kiranya pantas mendapatkan perhatian serius di satu sisi adalah munculnya partai-partai baru yang didukung oleh kekuatan-kekuatan militer lama yang pada masanya dipandang memiliki kemungkinan keterlibatan dalam beberapa tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dapat dengan mudah melupakan peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada masa lalu dan menerima begitu saja kehadiran partai-partai baru yang menjadi kendaraan bagi kekuatan militer lama. Memang, mereka yang merupakan bagian dari kekuatan militer lama dan pernah didakwa sebagai yang harus bertanggungjawab terhadap ketidakadilan kemanusiaan ini telah menjalani proses pengadilan dan pada akhirnya mendapatkan putusan bebas. Persoalannya, proses pengadilan telah dijalankan, namun keadilan terutama bagi para korban belum didapatkan sampai sekarang. Para korban dan keluarganya tetap menanggung resiko dari tindak ketidakadilan, namun tak pernah ada pelaku yang dapat memberikan pertanggungjawaban dan mendapatkan sanksi.

Yang menarik adalah bahwa kekuatan militer lama yang mengusung kendaraan baru dalam pemilu 2009 ini, secara menggiurkan mampu menawarkan program-program yang menarik dan menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat selama ini, terutama program ekonomi dan sosial yang berorientasi kepada masyarakat luas namun seringkali

**Sikap masyarakat yang memperlakukan pemilihan umum sebagai peristiwa yang biasa dan lumrah, meskipun memiliki nilai penting, merupakan petunjuk dari kedewasaan dalam berpolitik.**

community members or hosted a meeting for the village community, in which the candidate funded the meeting, gave a certain amount of money to the community, and at the end, asked the community members to vote for him/her in the Election. In such a meeting, the MP candidate usually extended a sheet of attendance records or list of future voters in the community with their signatures on it. For most villagers, any refusal to write their names on the list or to sign a promise to support the candidate in a public gathering might cause a miserable feeling, and therefore they would not have another choice but to write their names or to sign a promise. Yet, the most uncomfortable moment for villagers in such a meeting is when, at the end of the meeting, the MP candidate or one of the team asks the audience for their commitment to vote for the MP candidate, which has to be replied openly in the forum, which is sealed by the MP candidate that God witnesses the villagers' promise and that God will record the people who break their promise. This is one of the most common models which altogether constitute the *first challenge*.

*The second challenge* deserves serious attention as it has two faces. On the one hand, there are new political parties supported by the former military authorities who were potentially suspected to involve in the violation of human rights in the past. On the other hand, there is a phenomenon showing that most people could easily forget the incidents of human rights violation in the past and accept the presence of the new political parties of the old military establishment. It is simply true that those who belong to the old military establishment were tried for their alleged involvement to the injustice to humanity had undergone a legal process which ended in their release for their being not guilty. The problem is, while the trial process had been carried out, justice has not been done to the victims and their families yet. The victims and their families keep carrying the burden of the injustice over them without any single subject responsible for the injustice.

Of interesting is that the old military establishment who found the new vehicles in the 2009 Elections can convincingly offer interesting programs which address the urgent needs of the people, especially the social and economic programs oriented to the often-marginalized groups such as fishermen, farmers, small traders, and unemployed people. With such interesting programs, most people forget the various

terpinggirkan seperti nelayan, petani, pedagang kecil, dan kelompok masyarakat tuna karya. Dengan tawaran program sosial dan ekonomi yang menggiurkan itu, sebagian masyarakat menjadi lupa bahwa di negeri ini masih tersisa persoalan besar berupa aneka ragam tindak pelanggaran kemanusiaan yang belum pernah mencapai titik kesudahan. Persoalan ini seolah-olah tersisa hanya menjadi persoalan dan kesibukan bagi keluarga korban. Ini merupakan tantangan besar bagi perjuangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang semestinya membutuhkan solidaritas luas dari seluruh elemen masyarakat, dan bukan hanya menjadi pekerjaan kelompok kecil para pejuang HAM dan keluarga korban.<sup>3</sup>

Tantangan ketiga adalah semakin bertambahnya partai yang berdiri dengan platform keagamaan. Dari 44 partai peserta pemilu tahun 2009 ini, 6 di antaranya merupakan partai yang secara umum berplatform Islam. 6 partai itu adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu 2 partai di antaranya punya kaitan dengan agama Kristen yakni Partai Damai Sejahtera dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Berkaitan dengan partai Islam, Burhanuddin Muhtadi menyatakan bahwa karakteristik partai Islam pada umumnya dilihat dari dua hal, yakni dari dasarnya dan dari basis masanya. Dari sisi dasarnya, PPP, PBB dan PKS dapat disebut sebagai partai Islam karena asas dan ideologinya adalah Islam. Sementara itu, PKB dan PAN dapat dikategorikan sebagai partai Islam karena mengandalkan basis masa muslim meskipun kedua partai tersebut mengusung ideologi pluralis. Namun demikian, partai-partai Islam itu tidak homogen. Sebagian partai Islam disebut Islamis karena menempatkan Islam bukan hanya sebagai konstruksi teologis, melainkan juga sebagai penyedia perangkat sosial politik yang tidak memisahkan antara agama dan negara. Sementara sebagian partai Islam yang lain tidak disebut Islamis karena lebih memperhatikan nilai universal Islam sehingga tidak perlu mendukung perda-perda syariat dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Meskipun jumlah partai berbasis Islam yang mengikuti pemilu 2009 mengalami penambahan, hasil beberapa survey menyatakan bahwa peminat partai Islam mengalami

problems in the country, especially those related to the violation of human rights committed by the people who run the political parties. It turns as if for the people, the problem simply belongs to the victims' families. This is really a big challenge for the settlement of the various cases of human right violations in Indonesia, which should get broad solidarity from the whole elements of the community and which should not merely belong to the small group of human right defenders and the victim's families.<sup>3</sup>

The third challenge is the number of religious-based political parties is getting increased. Out of 44 political parties in the 2009 Election, there are six parties which can be classified as having the Islamic platform. The parties include *Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia* (United Indonesian People's Awakening Party), *Partai Kebangkitan Nasional Ulama* (the National Ulemas' Awakening Party), *Partai Bintang Reformasi* (the Reformed Star Party), *Partai Bulan Bintang* (the Crescent and the Star Party), *Partai Persatuan Pembangunan* (United Development Party), and *Partai Keadilan Sejahtera* (Justice and Prosperity Party). Meanwhile, there are 2 parties directly related to Christianity including *Partai Damai Sejahtera* (Peace and Prosperity Party) and *Partai Kasih Demokrasi Indonesia* (Indonesian Democratic and Love Party). On Islamic political parties, Burhanuddin Muhtadi stated that generally, the characteristics of Islamic parties are observable from two elements: the principle of the political party and the supporting mass of the party. From the principle side, PPP, PBB and PKS can be called Islamic political party since their principle and ideology is Islam. Meanwhile, PKB and PAN can be categorized as Islamic political party because they rely on the mass-support of Muslim people although both parties hold a pluralist ideology. Nevertheless, the Islamic political parties are not homogenous. Some Islamic political parties are called Islamic because they take Islam not only as a theological construction but also as a provider of social and political framework that does not separate religion and the State. Meanwhile, some other Islamic political parties cannot be classified as Islamic as they put the universal Islamic values so that they don't need to support or promote various Sharia-based regional laws.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>. The necessity of a broader solidarity for the investigation of the human rights violation in Indonesia was voiced by Ihdhal Kasim, the director of the National Commission for Human Rights, in a series of discussion on Human Rights in Southeast Asia in Gadjah Mada's PAU Sosial, March 25 2009. Such solidarity is required to encourage the political will of the State to comprehensively investigate the human rights violations, the latest of which was the assassination of Munir, which up till now has not arrived at a clear end as to who was responsible for the assassination. Muchdi Pr, who once a suspect in this case, was pronounced not guilty by the Court and later on joined the Prabowo Subianto-led Gerindra Party.

<sup>4</sup>. See Burhanuddin Muhtadi, "Prospek Partai Partai Islam dalam Pemilu 2009" (The prospects of the Islamic political parties in the 2009 Elections), available from <http://www.islamlib.com/> accessed on September 23, 2008.

<sup>3</sup>. Perlunya solidaritas luas untuk penyelesaian kasus HAM di Indonesia ini dinyatakan oleh Ihdhal Kasim, Ketua Komnas HAM, dalam serial diskusi HAM Asia Tenggara di PAU Sosial UGM, 25 Maret 2009. Solidaritas ini dibutuhkan untuk mendesak kemauan politik negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kasus terakhir adalah terbunuhnya Munir yang sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan siapa pelaku yang harus bertanggungjawab. Muchdi Pr, yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini dinyatakan bebas oleh pengadilan dan bergabung dalam Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto.

<sup>4</sup>. Lih. Burhanuddin Muhtadi, *Prospek Partai Partai Islam dalam Pemilu 2009*, <http://www.islamlib.com/> 23 September 2008.

penurunan yang berarti. Turunnya jumlah peminat partai Islam ini disinyalir karena pada satu sisi, partai-partai Islam itu dinilai cenderung hanya membicarakan masalah-masalah agama dan moral, dan gagal mengangkat isu-isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi masalah mendasar bangsa Indonesia. Di sisi lain, para pemilih muslim dalam pemilu 2009 sekarang ini dinilai jauh lebih rasional dalam menentukan pilihan sehingga cenderung memilih kompetensi sebuah partai untuk menjalankan program-program kesejahteraan bagi masyarakat daripada memilih partai berdasarkan identitas keagamaan.<sup>5</sup> Hal yang serupa juga berlaku dalam kemunculan partai-partai berazas Kristen. Para pemilih Kristen juga cenderung tidak berminat terhadap partai-partai berazas Kristen, dan cenderung lebih memilih partai-partai yang memiliki program kesejahteraan bagi masyarakat lebih luas. Prof. DR. Warsito Utomo MA, pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bahkan menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, partai berazas Kristen sebenarnya tidak mendesak diperlukan. Orang-orang Kristen justru disarankan untuk masuk dan terlibat dalam berbagai partai politik yang ada sebagai wadah yang lebih produktif untuk mewujudkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Kristen dalam kegiatan politik dan dalam produk-produk kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, seluruh praktik politik yang dijalankan oleh orang kristen harus dijauhkan dari segala kepentingan uang.<sup>6</sup>

Dari fenomena ini dapat dilihat sebuah tantangan bahwa akan hadir ketegangan atau tarik ulur antara kelompok kecil yang menginginkan agar Islam dijadikan sebagai penyedia perangkat sosial politik yang tidak memisahkan antara agama dan negara, di satu pihak, dan kelompok yang menginginkan agar nilai-nilai universal Islam sajalah yang dijadikan patokan dalam kehidupan bernegara, di lain pihak. Ketegangan ini akan mewarnai dinamika demokrasi masyarakat Indonesia ke depan sesudah seluruh proses pemilu legislatif dan pemilu presiden ini berakhir. Salah satu contohnya adalah ketegangan yang masih harus dihadapi dalam membangun demokrasi di Indonesia di mana terdapat perbedaan cara pandang berkaitan dengan pluralisme agama dan kesetaraan gender. Sebagian kelompok masyarakat memandang gerakan pluralisme dan kesetaraan gender

Sebagian kelompok masyarakat memandang gerakan pluralisme dan kesetaraan gender merupakan hal yang meruntuhkan fondasi Islam, mendangkalkan aqidah Islam, merombak tatanan keluarga dan sistem sosial Islam, yang semuanya itu dinilai sebagai upaya yang dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai kelompok yang memiliki Islamophobia.

Although there is an increase in the number of the Islamic political parties in the 2009 Election, the findings of some surveys reveal that the supporter of the Islamic political parties decreases significantly. The

decrease of support for the Islamic parties is caused by two factors. On the one side, the Islamic parties are perceived as simply talking about moral and religious issues but failed to address the economic and prosperous issues that constitutes the Indonesian fundamental problems. On the other side, voters of the 2009 Elections are supposedly more rational in making a choice so that they will see the competence of each political party in implementing the prosperity program for the people rather than making the choice based on the religious identity.<sup>5</sup> The similar condition is also true to the presence of the Christian-based political parties. Christian voters are increasingly disinterested in voting for Christian parties and tend to vote for the parties with real program for the prosperity of the society at large. Even Warsito Utomo, a professor of political sciences at Gadjah Mada University, suggested that in the Indonesian context, Christian political parties are not so urgent. Christian are suggested to involve in various political parties as more productive media to realize the Christian values into political activities in the forms of policies useful for the people in general. In addition, the whole political practices exercised by Christians should be exempted from any interests in money.<sup>6</sup>

From these accounts, there are challenges including the presence of tension between a small group that insist on making Islam as the provider of the social and political framework that does not separate religion and state and another groups that propose the universal values of Islam that should be taken as the principles of the nationhood. This tension will color the dynamics of the Indonesian democracy after the whole process of the 2009 Elections end. One of the examples is the tension in the development of democracy in Indonesia regarding the religious pluralism and gender equity. Some groups perceived pluralism and gender equity movements as the very thing that corrode the foundation of Islam, blur the Islamic principles and destroy the family order and Islamic social system, all of which are allegedly carried out by those with

<sup>5</sup>. Lih. Suara Partai Islam diprediksi Menurun dalam [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), 20 Maret 2009

<sup>6</sup>. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi buku Manifesto Politik Yesus, Kamis 23 april 2009, di Wisma Immanuel GMKI, Samirono, Yogyakarta, kerjasama antara PMKRI, GMKI, GAMKI, Forum Muda Katolik, dan Komunitas Kristiani DIY.

<sup>5</sup>. See "Suara Partai Islam diprediksi Menurun" (Voters for Islamic political parties are predicted decreased), available from [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), accessed March 20, 2009

<sup>6</sup>. This statement is heard in the discussion of a book entitled *Manifesto Politik Yesus* (Jesus' Political Manifesto), April 23, 2009, at Wisma Immanuel GMKI, Samirono, Yogyakarta, a joint event by PMKRI, GMKI, GAMKI, Forum Muda Katolik, dan Komunitas Kristiani DIY.

merupakan hal yang meruntuhkan fondasi Islam, mendangkalkan aqidah Islam, merombak tatanan keluarga dan sistem sosial Islam, yang semuanya itu dinilai sebagai upaya yang dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai kelompok yang memiliki Islamophobia.<sup>7</sup> Sementara sebagian masyarakat yang lain memandang pluralisme agama dan kesetaraan gender merupakan kewajaran yang pantas untuk didukung sebagai bagian penting dari demokrasi dan upaya perwujudan keadilan bagi seluruh masyarakat.

#### KONTEKSTUALISASI MANDAT AGAMA

Salah satu mandat agama adalah menjalankan fungsi profetisnya dalam pemerdakaan manusia dari segala belenggu yang menghalangi dan mengerdilkan pertumbuhan kemanusiaan. Belenggu itu dapat berupa pembodohan, pertikaian, kekerasan, ketidakadilan, pemiskinan, peminggiran, diskriminasi, dan sebagainya. Sudah sejak semula, para pembaharu dan pendiri spiritualitas agama-agama adalah orang-orang yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap pembelengguan martabat kemanusiaan ini dan menjalankan upaya-upaya pemerdakaan melalui seluruh hidup, kata-kata (atau ajaran) dan tindakan nyata. Kenyataan ini merupakan dasar yang sah dan kokoh bagi agama-agama untuk menjalankan fungsi profetiknya dalam bidang sosial dan politik pada masa sekarang ini dengan keragaman konteksnya.

Di negeri-negeri seperti Iran, Libanon, Polandia, Irlandia, Filipina, dan di beberapa negeri Amerika Latin, agama-agama telah menjalankan fungsi menampung aspirasi rakyat banyak serta mengambil bagian aktif dalam proses-proses demokratisasi. Di sana agama-agama menjalankan peran modernisasi politik yang sangat penting, terutama menjalankan fungsi oposisi terhadap berbagai rejim yang otoriter dan tidak adil. Agama-agama di negeri-negeri ini telah merevitalisasi pesan-pesan profetisnya dengan semangat baru, melalui keterlibatan dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan hak politik yang sama bagi seluruh warga masyarakat, terutama mereka yang cenderung

Islam phobic sentiments.<sup>7</sup> In the meantime, some other groups perceive religious pluralism and gender equity as two things deserving support as two important parts of democracy and the efforts to realize the justice for all.

#### Contextualization of the Religious Mandate

One of the religious mandates is to exercise its prophetic function in liberating human beings from all impediments that prevent and oppress the progress of the humanity. The impediments could be in the forms of deceit over people, hostility, violence, injustice, pauperization, marginalization, discrimination, etc. At the outset, the founder and reformer of religious spirituality were people who had deep concern on the impediments of the human dignity and made tremendous effort to liberate human beings through their lives, words (teachings) and real works. It is a genuine, reliable and strong foundation for religions to exercise its prophetic functions in social and political sphere with its various contexts today.

In such countries as Iran, Lebanon, Poland, Ireland, and the Philippines as well as some countries in the Latin America, religions have the functions of accommodating the people's aspirations and actively taking part in the process of democratization. Religions have an important role in the political modernization, especially to exercise the function as an opposition to various authoritarian and unjust regimes. In those countries, religions have revitalized their prophetic message

Salah satu mandat agama adalah menjalankan fungsi profetisnya dalam pemerdakaan manusia dari segala belenggu yang menghalangi dan mengerdilkan pertumbuhan kemanusiaan.

with new spirit through their involvement in the struggle for social justice, economic justice, and political equity for all, especially for those who tend to be victimized and marginalized.<sup>8</sup> In the context of

Christianity, the progressive role of religion in social and political life is known as the *liberation theology* movement. Gustavo Gutierrez, Joan Luis Segundo, Leonardo Boff, Michael Amalados and Bishop Romero are only some of the liberation's theologians. The Theology of Minjung in Korea, Theology of

<sup>7</sup>. Pandangan semacam ini disampaikan oleh Adian Husaini, seorang doktor dalam peradaban Islam di International Institute of Islamic Thought and Civilization International Islamic University Malaysia, dalam acara tasyakuran dan orasi ilmiah di Jakarta. Lih. *Republika*, 20 April 2009. Ini merupakan pandangan sebagian masyarakat di Indonesia

<sup>8</sup>. Lih. Th. Sumartana, *Kebangkitan Agama dalam Era Globalisasi*, dalam *Reformasi Politik, Kebangkitan Agama dan Konsumerisme*, Institut Dian/Interfidei, 2000, hlm.80-81

<sup>7</sup>.Such a perspective is put forward by Adian Husaini, who recently obtained a Ph.D in Islamic civilization from the International Institute of Islamic Thought and Civilization, International Islamic University Malaysia, in a public lecture in Jakarta. See *Republika*, April 20, 2009. The same perspective also belongs to a large part of Indonesian people.

<sup>8</sup>.See Th. Sumartana, "Kebangkitan Agama dalam Era Globalisasi" (The revival of religions in the Global Era) in *Reformasi Politik, Kebangkitan Agama dan Konsumerisme*, Institut Dian/Interfidei, 2000, pp.80-81

menjadi korban dan dipinggirkan.<sup>8</sup> Dalam konteks kekristenan, peran-peran progresif agama-agama dalam kehidupan sosial-politik ini dikenal dengan gerakan-gerakan teologi pembebasan atau teologi kemerdekaan. Gustavo Gutierrez, Joan Luis Segundo, Leonardo Boff, Michael Amalados, uskup Romero adalah beberapa nama yang dapat disebutkan sebagai para penggerak teologi pembebasan itu. Teologi Minjung di Korea, Teologi Perjuangan di Filipina, Teologi Dalit di India, merupakan contoh teologi-teologi pembebasan dalam wajah lebih khusus, yakni wajah Asia. Sementara itu, Maulana Sayyid Abul A'la Maududi, Ali Shariati, dan Asghar Ali Engineer adalah para pemikir dan penggerak Teologi Islam Progresif yang dapat disebutkan.

Dalam sejarah gerakan sosial politik di Indonesia, agama-agama memiliki sumbangan yang tidak kecil, terutama kalau ditelusur dari peran para tokohnya. Tokoh-tokoh gerakan sosial politik di Indonesia sebagian besar berasal dari gerakan keagamaan atau merupakan hasil didikan sekolah keagamaan pada masa kecilnya. Kiai Haji Samanhudi (Sarekat Dagang Islam), Haji Oemar Said Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim (Sarekat Islam), Mohammad Natsir (Masyumi dan pernah menjadi Perdana Menteri), Kyai Haji Mas Mansur (Pusat Tenaga Rakyat/ PUTERA), Mohammad Hatta (Hindia Poetra), Sjafruddin Prawiranegara (Pimpinan Pemerintahan Darurat RI), adalah tokoh-tokoh muslim yang mewujudkan agama sebagai inspirasi bagi gerakan sosial politik yang membela kemerdekaan, martabat manusia, dan keadilan. Dengan caranya masing-masing, mereka melakukan pendidikan sosial politik sebagai wujud nyata fungsi profetis agama yang dianutnya bagi kemerdekaan kemanusiaan. Bahkan secara sangat progresif, Sjafruddin Prawiranegara menunjukkan opsi pendidikan politiknya yang radikal dengan menyatakan bahwa manusia yang beragama dan beriman, tidak bisa lain, ia pasti kiri.<sup>9</sup> Artinya, setiap orang beragama sudah semestinya berpihak pertama-tama dan terutama kepada sesama manusia yang ditindas, dipinggirkan dan dicerabut hak-haknya oleh struktur yang tidak adil. Dalam periode lebih modern, almarhum YB. Mangunwijaya barangkali boleh disebut sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang berupaya menjalankan peran profetis agama dalam kemerdekaan martabat manusia melalui gerakan pendidikan. Bukan hanya melalui kata-kata, pilihan dan praksis hidupnya bersama mereka yang dikalahkan oleh struktur ketidakadilan, juga merupakan bentuk pendidikan politik yang sangat gamblang bagi semua mata.

Struggle in the Philippines and Theology of the *Dalits* in India are some example of the liberation theology in Asia. Likewise, Maulana Sayyid Abul A'la Maududi, Ali Shariati and Asghar Ali Engineer are the thinkers, actor and activator of the theology of Progressive Islam.

In the history of the social and political movements in Indonesia, religions had considerable contributions, especially when we look at the roles of the leading figures. The figures of social and political movements in Indonesia have largely come from the religious upbringing and religious education. Kiai Haji Samanhudi (the SDI, *Sarekat Dagang Islam*), Haji Oemar Said Tjokroaminoto and Haji Agus Salim (SI, *Sarekat Islam*), Mohammad Natsir (Masyumi, one of the former Indonesian Prime Minister), Kyai Haji Mas Mansur (Pusat Tenaga Rakyat/PUTERA), Mohammad Hatta (Hindia Poetra) and Sjafruddin Prawiranegara (the head of the PDRI) were some Indonesian Muslim figures who took religion as an inspiration for the social and political movement for political independence, human dignity and justice. With their own methods, they carried out social and political education as a concrete embodiment of the prophetic function of their religion for the liberation of human being. Even in a very progressive tone, Sjafruddin Prawiranegara showed the options of his political education by suggesting that *manusia yang beragama dan beriman, tidak bisa lain, ia pasti kiri* (for every true believer and religious person, there is no other option than being a leftist).<sup>9</sup> It means that all religious believers should first of all and most importantly

**Tokoh-tokoh gerakan sosial politik di Indonesia sebagian besar berasal dari gerakan keagamaan atau merupakan hasil didikan sekolah keagamaan pada masa kecilnya.**

take side to the oppressed and marginalized people whose rights are deprived by an unjust social structure. In a more contemporary period, the late Father Mangunwijaya may be

mentioned as one of the people who tried to implement the prophetic role of religion in the liberation of humanity through education. Not only his words, even his choice and his praxis of life to be with those who are deprived by the unjust system blatantly showed us an example of a political education.

<sup>8</sup>. YB. Mangunwijaya, *Kiri dan Kanan Dalam Sprachspiele*, dalam *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Gramedia 1999, hlm.209

<sup>9</sup>.YB. Mangunwijaya, "Kiri dan Kanan dalam *Sprachspiele*" (The left and the right in the *Sprachspiele*) in *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Gramedia 1999, p.209

## PENDIDIKAN POLITIK

Demi kemerdekaan kemanusiaan dan secara khusus demi kedaulatan rakyat, terutama pada masa-masa pemilu ini, agama-agama di Indonesia ditantang untuk menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat. Tiga tantangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni pembelian suara (*vote buying*), munculnya figur-figur militer yang mengancam diabaikannya proses penuntutan pelanggaran HAM pada masa lalu, dan ketegangan antar faksi yang mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia, sangat membutuhkan kedaulatan dan kecerdasan masyarakat untuk menghadapinya. Dalam rangka itulah, pendidikan politik masyarakat merupakan langkah yang wajib dijalankan oleh agama-agama.

Secara umum, pendidikan politik yang dijalankan oleh agama-agama diorientasikan kepada empat hal.<sup>10</sup> *Pertama*, pengetahuan politik yang mengacu kepada konsep, informasi dan pertimbangan faktual tentang sistem pemerintahan dan politik, sehingga tidak diarahkan kepada pemilihan terhadap partai politik tertentu. *Kedua*, keterampilan intelektual untuk membaca, menjelaskan dan menginterpretasikan fenomena politik sebagai penguatan independensi daya pikir rakyat. *Ketiga*, keterampilan partisipasi politik yang memperkuat kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerjasama dalam kelompok dan dengan orang lain, serta bernegosiasi dalam pengambilan keputusan politik. Keempat, sikap politik sebagai kesanggupan untuk mengambil pilihan-pilihan tindakan politik, menanggapi secara kritis promosi-promosi kepentingan politik, menghargai perbedaan pandangan, dan berkomitmen kepada nasionalisme dan kemanusiaan.

Secara khusus, pendidikan politik ini diarahkan kepada pembentukan harga diri rakyat dalam berpolitik, terutama dalam memilih calon pemimpin politik, sehingga dapat bersikap kritis dan tegas terhadap segala bentuk *vote buying* yang ditawarkan, dapat memilih calon-calon pemimpin yang dapat menjamin tegaknya perjuangan penegakan HAM dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, serta dapat mengupayakan terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata pada tingkat yang paling lokal. Dengan cara ini, agama-agama mengejawantahkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip spiritualitasnya dalam seluruh proses konsientisasi sehingga umat beragama menjadi warga negara yang berharga diri,

## Political Education

For the sake of the liberation of humanity and especially for the sake of the people's sovereignty in the context of the Elections, religions in Indonesia are challenged to carry out the political education to the people. The three challenges as delineated above, i.e., the practice of vote buying, the emergence of military figures that threaten the abandonment of the investigation into the human rights violations in the past, and the tension among the various factions that influence the democratic course in Indonesia, certainly demand the people's sovereignty and literacy in order to deal with. It is at this framework that the political education for the people becomes a mandate that religions should implement.

In general, the political education that religions need to carry out can be oriented into four types.<sup>10</sup> *First*, political knowledge that refers to the concepts, information, and factual considerations about the governmental and political system so that people cannot be unfairly engineered to vote certain political parties. *Second*, intellectual expertise to read, interpret and explain the political phenomena as an effort of strengthening the people's independence of reasoning. *Third*, skills in political participation that strengthen the capability to interact with one another, to cooperate in a group, and to negotiate in the political decision-making process. *Fourth*, political readiness and willingness to make political choice, to respond critically the promotions of the various political interests, to appreciate the differences and to make a commitment to the nationalism and humanity.

**Secara khusus,  
pendidikan politik ini  
diarahkan kepada  
pembentukan harga  
diri rakyat dalam  
berpolitik**

More specifically, this political education aims at positively constructing the people's dignity in exercising their political rights, especially when they vote for a candidate so that they can be critical against any kinds of vote buying practices, vote for the candidates who guarantee the struggle for the human rights and the continuation of the just investigation into the human

rights violation in the past and foster the realization of the democratic values in real life even in the smallest scope of social life. In so doing, religions can embody their spiritual values or principles in the whole conscientization so that religious believers can become citizens who have dignity, committed to a just future, refuse all kinds of vote buying practices that undermine the dignity of their political choice, able to read the

<sup>10</sup>. Lih. Ahmad Noor Fida, Pemilu 2009, Golput dan Pendidikan Politik, [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id), Rabu 29 April 2009

<sup>10</sup>. See Ahmad Noor Fida, "Pemilu 2009, Golput dan Pendidikan Politik" (The 2009 Elections, Non-voters, and Political Education), available from [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id), accessed April 29, 2009

**Pendidikan politik yang dijalankan oleh agama-agama ini sebenarnya merupakan sebuah proses saling mendidik dan saling belajar di antara seluruh warga beragama.**

berkomitmen terhadap masa depan yang lebih adil, emoh terhadap segala upaya suap dan jual beli suara yang merendahkan martabat pilihan politisnya, mampu membaca rekam jejak dan karakter calon pemimpin yang memiliki energi besar untuk berdaya tahan melanjutkan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM (penuntasan kasus terbunuhnya Munir, pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa, dsb), bersikap kritis terhadap pemuka-pemuka agama yang memiliki gelagat memanfaatkan warga beragama sebagai alat bagi pemenuhan kepentingan politik sempitnya sendiri, mampu mengidentifikasi calon-calon pemimpin yang memiliki kesanggupan untuk menghargai keragaman dan perbedaan tanpa harus mematahkan hak hidup kelompok lain yang berbeda, serta mampu mengidentifikasi calon pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan yang tinggi, yang mengkritisi ketidakadilan gender sebagai konstruksi sosial-budaya yang dapat diubah, sehingga perempuan dan laki-laki ditempatkan sebagai ciptaan yang setara dan sama dalam hak dan kewajiban, dan hanya memiliki perbedaan kodrati dalam empat hal, yakni kemampuan untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi; selebihnya adalah hal-hal yang dapat saling dipertukarkan (domestik dan publik).

Pendidikan politik yang dijalankan oleh agama-agama ini sebenarnya merupakan sebuah proses saling mendidik dan saling belajar di antara seluruh warga beragama. Baik para pemimpin agama-agama maupun warga umat beragama berada dalam proses saling mendidik secara dialogis melalui sharing pengetahuan, pandangan, sikap maupun tindakan politik. Upaya pendidikan politik semacam ini oleh AAG. Ari Dwipayana, pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, disebut sebagai *horizontal learning* terutama dalam konteks pendidikan pemilih di mana warga masyarakat saling memberikan informasi tentang sejauhmana para kandidat pemimpin politik yang muncul itu dapat mewakili aspirasi mereka. Warga saling berbagi informasi dasar mengenai rekam jejak para kandidat pemimpin politik tersebut, apakah mereka pernah melanggar HAM, apakah mereka pernah korupsi, apakah mereka pernah melakukan kejahatan lingkungan dsb.<sup>11</sup> Melalui *horizontal learning* dalam pendidikan politik yang lebih luas (bukan hanya pendidikan pemilih), agama-agama itu justru akan semakin memperkuat dirinya sendiri (empowering) dalam menjalankan fungsi profetisnya di bidang politik, sehingga agama-agama atau warga beragama menjadi semakin cerdas, semakin berdaulat, semakin berharga diri, dan semakin sanggup untuk terlibat dalam kehidupan politik tanpa harus menjadi terlipat oleh dunia politik.[]

track record and characteristics of the candidate who are expectedly to have enormous energy to continue the unfinished investigation of the human rights violation, critical to the religious leaders who have the symptoms of utilizing religious believers as tools to fulfill their personal political interest, capable of identifying the candidates who have willingness to appreciate diversity and differences without depriving the rights of the dissonant groups, and capable of identifying candidates who have a high vision of humanity which criticize the gender inequality as a socio-cultural construct that is subject to change, including the needs for man and woman to be placed equally in both rights and obligation except for four biological differences, i.e., the capabilities of conception, giving birth, breastfeeding, and have period, while the rest could be exchanged between man and woman, either in domestic or in public.

The political education carried out by the religions is actually a reciprocal process of educating and learning among the whole religious citizens. Both religious leaders and lay-people believers are in the reciprocity of learning dialogically through the sharing of knowledge, opinion, and political action. Such a political education, for AAG Ari Dwipayana, a lecturer in political sciences at Gadjah Mada University, is called horizontal learning, especially in the context of voters education, where people share information about how far the candidates can represents people's aspiration. People can also share the information on the track record of the candidates, including whether or not they committed in the human rights violation in the past, committed corruption, committed certain environmental crime, etc.<sup>11</sup> Through the *horizontal learning* in a wider political education (not just in the voters education), religions will just empower themselves by carrying out their prophetic functions in politics, so that religions or religious citizens become more intelligent and literate, have sovereignty and dignity, and get more prepared to involve themselves in the political life without necessarily being folded by it.[]

<sup>11</sup>. Lih. Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Horisontal, Situs Kabar UGM, [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)

<sup>11</sup>. See "Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Horisontal", available from [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)

## SANTRI DAN PENDIDIKAN POLITIK INTEGRAL

## SANTRIS<sup>1</sup> AND INTEGRAL POLITICAL EDUCATION

**M**. DIAN NAFI' adalah kiai muda yang sederhana, santun dan egaliter. Alumnus Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta yang menyelesaikan studi sarjananya di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta bidang Pendidikan Sejarah ini memiliki komitmen besar terhadap pemberdayaan untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Pengalaman belajar yang mendalam dan aktivitasnya yang luas di dunia internasional telah membuatnya mampu membahasakan wacana Hak Asasi Manusia secara gamblang, konkret dan bergayut dengan nilai-nilai dasar Islam bagi para santri dan masyarakat sekitarnya dalam konteks lokal. Hidup kesehariannya sangat ughari dan bahkan tak merasa canggung membuatkan segelas jahe hangat untuk santri yang ikut menemaninya ngobrol di ruang tamu. Berikut wawancara Redaksi Interfidei di rumah kediamannya tentang Pendidikan Politik di Pesantren.

Apa yang melandasi gagasan tentang pendidikan politik bagi santri pondok ini?

Pendidikan politik tidak pernah surut di pesantren karena manusia harus mengetahui siapa dirinya, yakni sebagai makhluk Tuhan, sebagai anak dari orang tua, sebagai suami dari seorang istri, sebagai tetangga, tetapi juga sebagai warga negara. Anugerah terbesar duniawi bagi pertanyaan "siapakah saya" adalah sebagai warga negara yang merdeka. Warga negara yang merdeka berhak memilih pemimpin. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang memilih pemimpin secara mandiri. Itulah anugerah yang besar dan harus disyukuri. Cara mensyukuri anugerah itu beraneka ragam. Ketika bersyukur sebagai saudara, sebagai anak dan sebagai tetangga itu masing-masing mempunyai caranya sendiri. Ternyata, cara bersyukur sebagai warga negara itu sangat mahal. Orang yang paling hemat dan paling banyak bersilaturahmi dari santri Windan, ternyata tetap harus membuang uang sejumlah 100 juta untuk menjadi calon legislatif dan pada akhirnya tidak terpilih. Ada yang mahal dari segi non uang. Ia memperoleh suara sekian ribu jumlahnya tetapi tetap tidak dapat masuk sebagai calon legislatif partai tertentu karena sebaran partainya banyak sekali. Dari pengalaman konkret ini dapat diketahui bahwa ternyata bersyukur sebagai warga negara itu mahal sekali. Nah pendidikan politik merupakan bagian dari cara mensyukuri anugerah terbesar duniawi sebagai warga Negara itu.

**M**. Dian Nafi' is a low-profile, benevolent, and egalitarian young *kiai*.<sup>2</sup> As a graduate of *Pesantren*<sup>3</sup> Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, he completed his undergraduate study at the faculty of Communication of the University of Sebelas Maret, Surakarta and the graduate program of The History of Education at the State University of Jakarta. He is highly committed to empowering reconciliation and peace. His deep studies and wide experience internationally have enabled him to successfully express the discourse of Human Rights explicitly, concretely, and relevant to Islamic basic values for all *santris* in particular and people in general, and yet still under the light of local context. He lives a moderate life that he will willingly serve hot ginger tea for *santris* who come to him to discuss religious and social issues. Below is the Interview Interfidei conducted with him on Political Education at *Pesantren* at his residence.

What does the idea of political education for santris in this pondok base on?

Political education has never ceased in *pesantren* because people must recognize themselves as God's creation, children of their parents, husbands, neighbours, as well as citizens. And the most valuable gift of the world to the question 'who am I' is the gift as liberated citizen. Liberated citizens are free to choose their leaders. A free nation is a nation that independently chooses her leader. This is the best gift to be thankful for. There are many different ways to express this thankfulness as brothers/sisters, children, and as neighbours. To express gratitude as a citizen is very expensive. It turns out that someone who is the most economical and regularly performs *silaturahmi* from *pesantren* of Windan still spends tremendous amount of money for approximately 100 million rupiahs to join legislative candidates, and finally fails to gain votes. It is also expensive from non-material part. He gains votes but cannot be one of the legislative candidates of particular parties for there are too many parties. We can learn from this that it is not easy to be thankful. Political education, thus, is a way to be thankful for being citizens of Indonesia.

<sup>1</sup>. Student of an Islamic seminary

<sup>2</sup>. Title given to Muslim scholars

<sup>3</sup>. Islamic Boarding School



Prinsip-prinsip apakah yang digunakan dalam pendidikan politik santri?

Pada umumnya, di dalam Islam itu terdapat lima platform atau disebut juga lima pilar. Namun, khusus bagi kalangan santri di pesantren NU (Nahdlatul Ulama), platform atau pilarnya ditambah satu lagi sehingga menjadi 6 yakni membangun kemaslahatan manusia (*istislahunas*). Itulah platform atau pilar yang keenam.

Membangun kemaslahatan itu tidak bisa tidak harus melalui sistem yang namanya negara. Kalau membangun kemaslahatan di luar negara itu menyalahi kodrat bahwa *ijmaulumati hujatun*. Itulah kodrat manusia. Manusia adalah *zoon politicon* (*binatang politik*, istilah yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam *Republic-Red*). Kesepakatan rakyat itu merupakan argumentasi mendasar dalam rangka membangun kemaslahatan. Maka para santri terhitung sebagai orang yang tidak mempersoalkan pemilu langsung. Memang ada sebagian santri yang sempat membicarakan pemilu langsung terkait dengan kesiapan budaya politik kita, tetapi toh akhirnya mereka tidak berpikir untuk golput dalam jumlah besar. Kelima pilar yang sudah umum dalam Islam itu di kalangan santri biasanya dianggap tidak afdol kalau tidak ditambah satu lagi, yakni membangun kemaslahatan manusia itu tadi.

Lima pilar itu isinya apa saja?

Lima pilar itu terdiri dari *pertama*, adalah kemerdekaan untuk beragama dan berkeyakinan (*hifdh ad-din*). *Pilar kedua* adalah menjaga akal (*hifdh al-'aql*). Yang termasuk di dalam pilar kedua ini adalah kemerdekaan bereskrepsi, dan hak memperoleh informasi. *Pilar ketiga* adalah menjaga jiwa raga (*hifdh an-nafs*). Yang termasuk di dalamnya adalah memperjuangkan hak atas kesehatan, dan standar pelayanan minimum di bidang kesehatan. Kita harus mempunyai standar pelayanan minimum karena terbukti dari sudut itu negara kita sangat bolong. Selain itu, yang termasuk dalam pilar ketiga ini juga persoalan jaminan makanan yang memadai sejak kanak-kanak. Yang disebut sebagai *The lost generation* itu adalah mereka yang dari segi makanan dan gizi, luar biasa memperhatikan karena tidak adanya penegakan hukum yang berarti berkaitan dengan perlindungan dan jaminan makanan yang memadai. Cobalah lihat di sekeliling kita bagaimana mungkin makanan yang berbahaya bagi ginjal dapat dibiarkan leluasa beredar di lingkungan anak-anak Sekolah Dasar. *Pilar keempat* adalah menjaga keturunan (*hifdh an-nasl*). Yang termasuk di dalam pilar keempat ini adalah hak reproduksi atau hak bersilsilah. Kita bisa merasa iri kalau mendengar cerita bahwa di negara tertentu, ketika suami dan istri yang sudah berumah-tangga selama 4 tahun namun belum mempunyai keturunan, ternyata mendapatkan jaminan dan dibiayai oleh negara. Karena penghargaan negara kita tidak normatif maka penghargaan terhadap keturunan juga

What are the principles applied for political education for *santris*?

Generally there are five platforms of Islam which are known as the five pillars. However, for the NU *santris*, there is one additional platform that is building common good (*istislahunas*).

Building common good must be done through a system that is the state. Building common good apart from the state is against fate, the *ijmaulumati hujatun*, which is the fate of the people. Humans are *zoon politicon* (political animal, a term promoted by Aristotles in *Republic-ed*). Social agreement is a basic argumentation in building the common good. This why *santris* are regarded as those who don't trouble general election. There are of course some *santris* who once problematize the election and the readiness of our politic and culture, but the number of *santris* in the non-voting group is relatively small. The five known pillars among the *santris* will not be considered prominent if not completed with another one that is promoting common good.

What are the five pillars?

The five pillars are: first, religious freedom and faith (*hifdh ad-din*); second, to be careful of the mind (*hifdh al-'aql*). Religious expression and the right to gain information included in this second pillar. The third pillar is caring for body and soul (*hifdh an-nafs*), to struggle for the rights for health and the minimum standard for health. We should also have standard for service because our nation is lack of this element. Another point included in the third pillar is on sufficient foods for all people from their early age. The lost generation is those people who don't have limited access for foods and nutrition, whose access for these are not legally guaranteed. One of the examples is the widely distributed foods around elementary schools which are dangerous for humans' kidneys. The fourth pillar is keeping descendants (*hifdh-an nasl*). The rights for reproduction and for having pedigree are included in this pillar. People are sometimes jealous when hearing stories from other nations where husband and wife who have been marrying for more than 4 years yet don't have children are awarded guarantee and funds from the state. Since awarding in Indonesia is not normative, so to give award for having



Kyai M Dian Nafi Msi

Pengasuh  
Ponpes Al Muayyad  
Windan, Kartasura

tidak normatif. *Pilar kelima* adalah menjaga harta atau *property (hifdh al-mal)*. Di dalam-nya termasuk hak atas kekayaan intelektual, dan peningkatan kapasitas rakyat dalam mengkonsolidasi kekayaan. Apakah kita tidak merasa risih dan galau ketika melihat kenyataan bahwa rakyat telah bekerja keras selama lima puluh tahun sepanjang hidupnya, namun kemudian di ujung usia tua dia mendapati betapa pensiunnya tidak berarti. Kebijakan moneter ini sejak dari akarnya memang bersifat *ribawi*, sehingga otak atik moneter ini dianggap sebagai hal yang lebih penting daripada pembelaan terhadap sektor riil. Banyak petani terpaksa menjual tanah karena nilai tukar produk pertanian sedemikian rendah. Menurut hemat saya ini bukanlah soal kebetulan melainkan sesuatu yang bisa diperjuangkan, yakni dengan pemihakan kepada sektor riil. Maka tidaklah mengherankan apabila ada banyak sekali pesantren yang mempunyai kebijakan kurikuler berupa larangan untuk jajan. "Santri dilarang jajan. Semua santri mendapatkan giliran piket berbelanja, piket memasak untuk seluruh penghuni. Sejauh bisa melakukannya sendiri, santri tidak perlu mengundang orang yang dibayar untuk berbelanja dan memasak". Ini dimaksudkan sebagai internalisasi pemihakan kepada sektor riil di kalangan santri.

Nah, *Pilar Keenam*, yang menjadi tambahan bagi para santri, yakni membangun kemaslahatan umat itu dirumuskan dengan menjaga harga diri. Menjaga harga diri itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai harkat dan martabat. Dari sisi *ushul fiqh*, pantas diperjelas apa yang dimaksud dengan *harkat* dan apa yang dimaksud dengan *martabat* itu. Harkat presiden dan rakyat itu sama selama masih ada gerak di dalam nadi. Harkat itu arti harafiahnya adalah *gerakan*, selama nadi masih berdenyut, itulah *nisbahnya* manusia, meskipun tidak memiliki tangan. Mengapa ini penting? Ini sangat serius. Di dalam piagam Madinah, konsep warga negara tidak dilihat dari segi apakah seseorang itu berfungsi secara efektif di dalam kolektivitasnya. Ini sangat penting, karena berdasarkan piagam madinah itu, orang imbisil (difabel), dalam kerangka kemaslahatan ini sangat termasuk di dalam hitungan. Hak sipil dan politiknya harus dilindungi dan dipenuhi, demikian juga hak ekonomi-sosial-budayanya harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Itulah yang dimaksudkan dengan harkat.

Nah sementara yang dimaksud dengan martabat bagi setiap manusia itu berbeda-beda karena di dalamnya terdapat aspek usaha dari manusia itu sendiri. Demikianlah maka protokoler rakyat dan presiden tidaklah sama. Tempat duduknya awam dan agamawan jadi berbeda. Itulah martabat. Tetapi penghormatan kepada martabat dengan mengabaikan penghormatan kepada harkat, akan menjadi *oligarki*. Kalau mau lebih dekat kepada prinsip keagamaan, hemat saya keduanya harus seimbang. Nabi pernah mengatakan bahwa pemimpin suatu lapis masyarakat itu adalah pelayan bagi mereka. Kemudian diringkas bahwa pemimpin itu adalah pelayan. Itu disebabkan karena nabi menempatkan rakyat

descendants in Indonesia is not normative as well. The fifth pillar is keeping wealth and properties (*hifdh-al mal*). Intellectual rights and improvement of people's capacity, as well as to consolidate wealth are included in this pillar. Won't someone be uneasy and confused witnessing the people living terrible life at their old age after working so hard during their productive years? Our monetary policy has been usurious from the very beginning that monetary re-arrangement is considered more important than taking real action. There are many farmers who forcibly sell their lands because of the decreasing values of their products. This is why it is not surprising when there are many *pesantren* with curricular monetary to prohibit their *santris* to buy snacks from outside. "All *santris* are not allowed to buy snacks. Each *santris* will have turn to shop and cook for the entire members of the *pesantren*. Each of the *santris* is encouraged to accomplish the task by himself as best as he may without spending extra money for help". This is meant for internalizing real action to take side among the *santris*.

The sixth pillar is additional for the *santris*: to build common good of the assembly which is later formulated as self-esteem. Self-esteem is closely related to human dignity and values. It is very important to also clarify what are human dignity and values from the perspective of *ushul fiqh*. The dignity of a president and a civilian is the same as long as their pulses still beating. Dignity literally means movement. Beating pulse is the *nisbah* of an individual even though s(h)e is handicapped. Understanding this is important because this is serious matter. The Madinah charter respects everyone not because whether or not one effectively functions in one's collective group. The charter regards even an imbecile as someone deserves for the idea of common good. His/her civil and political rights must be protected and guaranteed as well as economic-social-cultural rights. This what dignity is.

Status is different from dignity and is not the same from one to the other since it is related to individual effort. That is why protocol of the people is different to the president's. The position of the lay is different from religious leaders. This is understood as status. But, to treat between status and dignity in imbalanced way will result in oligarchy. From religious perspective, I personally think both humans' dignity and status have to be balanced. The prophet said that a leader is a servant. This is because the Prophet treated people not in regard with their functions but their *nisbah* as humans. Surah 'Abasa, juz 30 recites that even blind people are just the same with those who are not blind and richer.

What is the orientation of this political education for *santris*?

This political education is meant to respond three important questions. The first question is on who am I. Political education for *santris* is helpful in addressing the question on one's identity especially as a citizen.

tidak dari peran efektifnya belaka tetapi karena nisbahnya yang dasar sebagai manusia. Maka dalam surah 'Abasa, juz 30, disebutkan bagaimana orang buta sekalipun punya hak yang sama dengan orang yang tidak buta yang jauh lebih kaya.

Kemanakah orientasi pendidikan politik santri ini?

Pendidikan politik bagi santri ini diorientasikan untuk menjawab tiga hal pokok. *Pokok pertama* adalah pertanyaan tentang siapakah manusia, atau siapakah saya. Pendidikan politik diorientasikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pendidikan politik sangat berkait erat dengan jawaban dari pertanyaan tentang siapakah saya itu, terutama saya sebagai warga negara.

*Pokok kedua*, pendidikan politik itu harus mampu menjawab siapa saya dan orang lain atau sesama saya. Karena kalau pertanyaan pertama tidak dilanjutkan ke pertanyaan kedua, kita akan terus dianggap sebagai massa dan dipinjam terus, *disilih limang tahun sepisan* (dipinjam lima tahun sekali) dan selalu berstatus massa. Artinya massa itu adalah sekumpulan orang banyak yang tidak saling kenal dan tersebar. Maka saya sangat gelisah ketika mendengar ada sebutan massa mengambang, karena itu berbahaya sekali. Maksudnya, perlu dijawab pertanyaan siapakah pegawai negeri itu ketika dikaitkan dengan sesamanya yang petani. Siapakah pengusaha itu ketika dikaitkan dengan masyarakat adat. Ini adalah pertanyaan level kedua, karena kalau tidak pernah terjawab, setiap orang hanya akan hidup sendiri-sendiri dan hanya akan hidup dalam lingkungan pekerjaannya. Kondisi semacam ini justru menjadi sasaran empuk bagi serbuan dari luar. Sehingga hidup masyarakat menjadi seperi tidak membangun satu kesatuan dan tidak terkait.

Kalau pertanyaan kedua ini tidak terjawab, setiap orang akan asyik dengan kotaknya sendiri-sendiri, yakni kotak status dan peran yang tidak saling sambung. Maka sangat menyedihkan bahwa justru sejak terbentuknya departemen kehutananlah, hutan kita malah rusak secara progresif. Justru setelah ada kebijakan pengentasan kemiskinanlah, jumlah orang miskin meningkat tajam.

Siapa saya dan orang lain meniscayakan kemampuan mengelola interaksi antara saya dan orang lain melalui proses berunding, mediasi, dan arbitrase. Oleh karena itu, apa yang ditawarkan oleh pondok pesantren Windan adalah pemberdayaan untuk rekonsiliasi, yakni bagaimana mengelola konflik tanpa kekerasan. Kosmologi Jawa mengenal tiga tingkat berpikir, yakni tingkat kasepuhan, kasunyatan dan kanuragan. Kalau diajukan pertanyaan, yang dimaksud dengan hidup rukun itu bagaimana? Umumnya orang Jawa itu berhenti di tataran kasepuhan dan normatif. Hidup rukun itu

The second question to address is on who are others. The first and the second questions are related one another. If one ends the search for one's identity only and doesn't relate to others, we will always be regarded as *massa* (mass) who will be intentionally involved once for five years, only for election (*disilih limang tahun sepisan*). A mass is a group of people who don't know and relate to each other. This is the reason why I am so anxious with the word *massa* because leaving it that way is dangerous.<sup>4</sup> It is essential to understand who is a civil officer when related to a farmer, and who is an entrepreneur when related to community of *adat*. People will stop with leaving their own lives for being unaware of such questions. This ignorance is fragile since the people are not united and close to each other, and thus will be easily broken.

The failure to respond to the second question will result in one being comforted living in individual's box, a box of status and role which are separated from the other. This is reflected through sad facts that our forests have been progressively destructed since the formation of Forestry Department and the increasing number of poverty since the establishment of policies to eradicate poverty.

To understand who one is and who others are is an attempt to interact to each other through a process of discussion, mediation, and arbitration. Thus, *Pondok Pesantren Widan* is offering empowerment for reconciliation to manage conflicts without violence. Javanese cosmology recognizes three level of ways of thinking: *kasepuhan*, *kasunyatan*, and *kanuragan*. When addressed the question what is a harmonious life, Javanese people will generally stop at the level of *kasepuhan*, a normative level. They will respond that a harmonious life is a good life. But how to realize this harmonious life or *kasunyatan*?

We can learn *tepa selira* (empathy), justice, *zing bener diugemi* (holding up the truth), and low profile from Java elders with the hope that these values will be real action instead of mere norms. And of course, to realize this needs struggle. What *kanugaran* (real form) is needed to be really just? What humans should do? It is a lesson of political *fiqh* or *fiqh syiyasah* without *dalil* (arguments). What *kafaah* is needed? *Kafaah* to discuss to maintain relationship even when involved in conflict is important until people are capable to manage problems with litigation, court, and so on, but still embrace each other as the legal process is done. This can be trained, and *pesantren Widan* focuses on training this skill.

Thirdly, political education should respond to the question on who are people for their neighbours. Everyone should have a profession. All *kiai* and elders of *pesantren Muayyad* are *kiai* with their own professions. Some of them are

<sup>1</sup>.Kegelisahan ini dituangkan dalam sebuah buku berjudul *Praxis Pembelajaran Pesantren*, disusun dalam kerjasama antara Forum Pesantren, Yayasan Selasih dan Institute for Training and Development (ITD) Amherst Massachusetts.

<sup>4</sup>.He shared his anxiety in a book entitled *Praxis Pembelajaran Pesantren*, published in cooperation between Forum Pesantren, Selasih Foundation, and the Institute for Training and Development (ITD) Amherst Massachusetts.

baik. Nah bagaimana yang baik ini menjadi kenyataan atau kasunyatan? Realitas apa yang harus ada agar hidup rukun itu menjadi kenyataan? Dari orang sepuh Jawa, kita bisa belajar *tepa silira* (tenggang rasa), keadilan, *sing bener diugemi* (kebenaran dijadikan patokan), bukan karena berpangkat lalu *semaw gue*. Sehingga yang namanya keadilan, tenggang rasa, dan kebenaran harus menjadi kenyataan dan realitas, bukan hanya norma. Oleh karenanya ini dpergumulkan. Supaya benar-benar adil lalu membutuhkan *kanuragan* (wujud real) apa? Manusia harus bisa apa? Ini sebenarnya merupakan pelajaran fikih politik atau *fiqh syiyasah* tanpa dalil. *Kafaah* apa yang harus ada? *Kafaah* berunding, tetap menjaga hubungan walaupun sedang bertikai. Ini kemampuan yang dibutuhkan. Sampai akhirnya bisa mengelola masalah melalui litigasi, pengadilan dan sebagainya, namun setelah selesai proses pengadilan, semua pihak tetap dapat berangkuhan. Kemampuan ini bisa dilatihkan. Pondok pesantren Windan ini memilih untuk berfokus ke topik ini.

*Pokok Ketiga*, pendidikan politik harus menjawab pertanyaan siapakah manusia untuk orang lain. Setiap orang itu harus berprofesi. Semua kyai pendiri dan sesepuh pondok Al Muayyad adalah kyai-kyai yang berprofesi. Ada yang menjadi penjahit, pengusaha, dan sebagainya untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka muara kurikulum di pesantren ini, adalah ilmu yang mengarah kepada kyai, ilmu yang mengarah kepada *juragan*, dan ilmu yang mengarah kepada *priyayi*. Orang boleh menjadi kyai tetapi tidak boleh meninggalkan *juragan*. Orang yang berani *nggetih* (kerja keras), dia akan menjadi *juragan*. Ia menjadi kaya karena keringatnya sendiri bukan karena pemberian orang lain. Orang boleh menjadi politisi tetapi dia harus menjadi *juragan*, sehingga ketika menjadi calon legislatif, dia sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan atau *juragan* atau profesi untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan demikian, menjadi legislatif itu bukan sebagai sumber pendapatan melainkan sebagai pengabdian. Jadi ada perbedaan antara profesi dan vokasi. Profesi atau *juragan* itu untuk menunjang kehidupan, sementara vokasi itu panggilan. Jadi yang dimaksud dengan *Juragan* adalah orang yang menduduki kehormatan dan statusnya karena bekerja keras. Sementara *Priyayi* adalah orang yang terhormat karena kedudukannya, yakni orang yang menjalankan kode etik dalam kedudukan itu. Untuk membantu santri agar dapat menjadi *priyayi*, di sini diselenggarakan kursus *laden*, *sinoman*, *pidato* dsb.

Apa yang menjadi materi utama dalam pendidikan politik itu?

Materi pendidikan politik itu sebenarnya secara keseluruhan dapat disebut sebagai pendidikan kewargaan.

Bagaimana deskripsi model pendidikan politik yang

**Pendidikan Politik Santri diorientasikan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok:**

1. Siapakah manusia
2. Siapakah manusia dan sesamanya
3. Siapakah manusia untuk orang lain

tailors, entrepreneurs, etc in order to support their lives. For this reason curriculum in this *pesantren* emphasis on the knowledge that directs to *kiai* which directs to *juragan* and finally to *priyayi*. One can become a *kiai* but not leaving *juragan*. One can *nggetih* (work hard) to be *juragan*. One can be rich with one's own hard work and not others. One can be a politician but must remain a *juragan* that if one day he is a legislative candidate he already has a job to support his life. Thus, being a legislative representative is not a job to raise income but a service. There is an obvious difference between profession and vocation. A profession or *juragan* is to support personal life while vocation is a call to service. *Juragan* is those who have respected position and social status with their own hard work. *Priyayi*, on the other hand, is those who are respected because of their position or status, who act on ethics code. Our *pesantren* provides courses on *laden*,<sup>5</sup> *sinoman*,<sup>6</sup> speech, etc.

What is the core material for political education?

The material for this political education as a whole is on citizenry education.

Can you describe the model for political education that you are performing?

There are three levels of education for *santris*. The first level is on self-analysis (for 1 week). The second one is on organizational management (on how to make decision: to discuss, to mediate, etc) for half a month. This training emphasis more on strategic management. The third level is on community development which takes place for half a year. Each of the levels practices on *Praktek Pengalaman Lapangan* (Field Professional Practice) for a month. Those who pass the third level usually will be able to create a program almost similar to community Organizer. After passing these three levels, the *santris* are free and supported to take other educational

<sup>5</sup>.Literally means to serve

<sup>6</sup>.Youth community service

dilakukan?

Pendidikan untuk santri meliputi tiga level. Level pertama adalah analisis diri (selama seminggu). Level kedua adalah manajemen organisasi [mengambil keputusan: berunding, mediasi dsb] selama setengah bulan. Yang dilatihkan terutama adalah manajemen strategis. Level ketiga disebut kursus pengembangan masyarakat yang dijalankan selama setengah tahun. Masing-masing level menggunakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama sebulan. Mereka yang sudah lulus level tiga rata-rata sudah bisa membuat program setingkat *Community Organizer*. Setelah melampaui tiga level ini, para santri dibebaskan dan didukung untuk mengikuti paket-paket pendidikan yang lain seperti keadilan gender, pendidikan inklusif dan sebagainya yang diselenggarakan oleh berbagai macam lembaga atau komunitas di luar pesantren.

Setelah menjalani seluruh proses pendidikan politik ini, para santri dibebaskan untuk menjalankan proyek pendidikan politik sendiri. Model yang dijalankan adalah penguatan masyarakat lokal untuk pengawasan kebijakan publik. Juru parkir, asongan, tukang becak dan pemulung menjadi subyek pendidikan ini. Para santri menjalankan pendidikan bersama mereka. Proyek pendidikan politik bersama komunitas-komunitas itu membuat komunitas juru parkir, tukang becak dan asongan ini sampai pada kesadaran bahwa negara tidak memberikan perlindungan terhadap mereka. Perlindungan itu dikaitkan dengan retribusi. Dari hal-hal kecil seperti retribusi, KTP dan sebagainya itu mereka menjadi mengerti tentang berbagai macam peraturan daerah.

Siapa saja yang terlibat dalam pendidikan politik?

Kami melakukan pendidikan politik santri ini bersama dengan teman-teman yang sekarang menjadi PATTIRO, bersama teman-teman dari Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS), Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan (PPLP) Maarif, dan teman-teman dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Munculnya banyak partai Islam sendiri memiliki kontribusi apa terhadap pendidikan politik masyarakat santri?

Ada partai berbasis kebangsaan, keagamaan, kelompok (buruh) tapi faktanya yang selalu menang adalah partai berbasis kebangsaan. Ada pernyataan menarik bahwa pemerintahan itu akan lestari jika adil, meskipun kafir. Pemerintahan itu akan jatuh karena tidak adil meskipun muslim. Tuhan itu mengubah kemungkaran dengan pemimpin selama kemungkaran itu tidak dapat diubah oleh Al Qur'an. Hal-hal semacam ini menjadi pengamatan santri. Ketika di suatu wilayah, masyarakatnya sudah hapal Qur'an tetapi masih banyak terjadi kemungkaran, maka dibutuhkan pemimpin. Manakah yang lebih baik, ada kepemimpinan otoriter atau tidak ada kepemimpinan sama sekali? Menurut

packages such as on gender, inclusive education, etc offered by other institutions or communities.

As *santris* fulfill the whole process of the political education, they are free to organize their own projects on political education. The model the *santris* run is on empowering local community to supervise public policy. This type of education is subjected for parking lot attendants, vendors, pedicab drivers, and scavengers. The *santris* organize it together with them. This project in collaboration with local communities helps the subjects to be aware that the state doesn't provide protection for them. Protection is connected with retribution. Small entities such as retribution, ID cards, etc help them to understand regional laws.

Who are involved in political education?

We organize this political education for santris in cooperation with our friends from PATTIRO, Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS), Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan (PPLP) Maarif, and Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

How does the emergence of Islamic parties contribute to political education for *santris*?

There are parties with different bases, on nationality, religion, or certain group (labour party for example). However, it is the nationality-based party that always wins the election. There is interesting statement that the government will be everlasting if it is just eventhough is *kafir*. A government will fall if it is unjust even if it is Moslem. God alter disobediences with the presence of a leader when they cannot be done by Al Qur'an. Santris observe these details. If in an area the people are capable to recite Qur'an very well but there are still defiances there is the need for a leader. Which of these is better: an authoritarian government or no government at all? According to me, the absence of leadership or anarchy is more dangerous than an undemocratic one. This is the reason why our santris become cadres of PDIP, PPP, PKNU, and so forth. The santris are free to choose their own action as well as their political parties.

The emergence of Islamic political parties is a form of people's willingness to manifest their values and beliefs. It is important to remember though that it is possible to build an Islamic state but not a santri state. A santri state is more important yet more difficult since Islamic ethics must be conducted consistently especially when one is a leader. Nevertheless, the most important is a state with religious values which are not merely symbols.

Under this context, we need to understand neutrality, procedure, and neutrality of theme. In a plural nation like Indonesia, the neutrality of theme is often rejected. This means that each person has the right to contribute one's faith to strengthen the state's platform that as long as the theme

saya, kekosongan kepemimpinan atau *anarkhi* itu jauh lebih berbahaya daripada kepemimpinan yang tidak demokratis. Oleh karena itu, santri-santri Windan itu ada yang menjadi kader PDIP, PPP, PKNU dan sebagainya. Para santri itu bebas memilih aktivitas dan partai politiknya.

Munculnya partai-partai islam itu merupakan wujud dari kemauan orang untuk mengejawantahkan nilai-nilai yang diyakininya. Namun pantas diingat bahwa seringkali orang bisa mendirikan negara Islam tetapi tidak dapat mendirikan negara santri. Negara santri ini jauh lebih sulit dan lebih penting, dimana etika Islam dijalankan secara konsisten, terutama ketika seseorang memegang jabatan. Yang lebih utama adalah adanya negara yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, dan bukan yang sekedar melambungkan simbol-simbol keagamaan.

Dalam konteks ini ada istilah yang penting dipahami yakni *netralitas prosedur* dan *netralitas tema*. Di negara yang plural seperti Indonesia ini, netralitas tema ditolak. Artinya, masing-masing berhak menyumbangkan nilai keyakinannya untuk memperkuat platform kenegaraan sehingga dari sisi tema tidaklah netral. Masing-masing tema boleh ikut memperkaya. Tetapi harus ada netralitas prosedur, agar seseorang yang kuat kemuslimannya, misalnya, ketika hendak menyumbangkan temanya ke platform nasional bisa diterima oleh siapapun karena prosedurnya netral. Nah siapapun dia akhirnya bisa begitu, entah itu muslim entah itu kristen. Ini meleluasakan partisipasi dan memperkaya platform.

Bagaimana kerangka dasar pendidikan umum santri di sini?

Santri di sini dididik untuk mandiri. Setiap santri dididik untuk belajar menghidupi dirinya sendiri. Ada banyak metode dan latihan yang digunakan. Sebagai contoh kasus, ada santri yang setelah lulus dari pondok ini berniat untuk mencari kerja, menikah, membangun rumah, naik haji, dan membeli mobil. Dalam perjalanan waktu, setiap tahap keberhasilannya selalu dikomunikasikan kepada kami. Sekian bulan kemudian, ia memberi kabar bahwa ia sudah bekerja dengan cara menjadi pedagang keliling, lalu punya kios, lalu punya kios dua, lalu memberi kabari bahwa dua kios yang dibelinya itu ternyata sangat strategis, lalu menikah, beli rumah, dan setelah 2 tahun ia bisa berangkat haji. Akhirnya ia minta ijin untuk membeli mobil *pick up* untuk mendukung usahanya.

Menurut saya, seluruh proses ini adalah pendidikan politik karena aspirasinya sudah berbeda dari ketika ia masih belajar di pondok ini. Setelah melampaui tahap-tahap hidupnya itu, ketika bertemu dengan politisi dan calon legislatif misalnya, ia sudah mempunyai *bargaining*. Inilah pentingnya harkat dan martabat. Ia tidak lagi bergantung kepada orang lain dan mudah diatur oleh orang lain, bukan lagi menjadi massa, tidak dipertunjukkan, dan tidak mudah diperalat.[]

ada istilah yang penting dipahami yakni netralitas prosedur dan netralitas tema.

concerns there is no neutrality. Every theme is welcomed to participate but there should be neutrality of procedure so one who is a devoted Moslem for example is accepted when contribute theme to the platform because the procedure is neutral. Each person can act this, Moslem or Christian or other else to participate in enriching the platform of the state.

What is the framework of political education for *santris* here?

Our *santris* are educated to be independent. They are trained to be responsible for themselves. There are many methods and trainings for the *santris* to be self-sufficient for instance they will find jobs as soon as they graduate from school, marry and have families, go for haji, or buy a car. As time goes by, our *santris* will inform us their achievements. They will tell us if they already have jobs as vendors or if they own stands which are very strategic, then if they get married and buy a house, and that in two years they will go for haji. And finally, they will ask permission to buy a pick up car to support their businesses.

I think this whole process is political education because the aspiration is different since to the one the *santris* learned while in this *pondok*.<sup>7</sup> They will have bargaining power when dealing with politicians and legislative candidates as after finishing these stages in their life. This is why human dignity and values are very valuable. It is hoped that the *santris* will no longer depend on others nor easily controlled by people. They are no longer masses that are easily manipulated.[]

<sup>7</sup>.Islamic boarding school

## FORUM KERJA LINTAS AGAMA (FKLA) PROPINSI LAMPUNG

**K**EBERADAAN lembaga yang mampu menjembatani perbedaan di tengah masyarakat majemuk sangat penting. Mandatnya adalah menumbuhkan sikap saling menghargai, menciptakan suasana harmonis dan dialogis. Dalam edisi ini kami menyuguhkan kepada pembaca sekalian profil Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) Propinsi Lampung.

Munculnya FKLA pada awalnya diilhami oleh persamaan persepsi antara tokoh lintas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) bahwa dialog, komunikasi dan kerjasama lintas agama merupakan sebuah keniscayaan di tengah masyarakat yang plural dan heterogen. Kesadaran terhadap perlunya dialog, komunikasi dan kerjasama lintas agama, disamping sebagai upaya optimalisasi peran tokoh dan umat beragama juga untuk mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Hal ini dimaksudkan sebagai langkah persuasif terhadap merebaknya disharmoni serta konflik sosial yang berlatar belakang agama atau mengatasnamakan agama. Sebab jika hal itu terjadi maka "*social cost*"-nya mahal sekali.

Dengan latar belakang kesamaan persepsi dan pandangan tersebut, Yayasan Percik Salatiga, Pengurus Wilayah NU Provinsi Lampung dan Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) berusaha merealisasikan bentuk-bentuk kerjasama dan membangun komunikasi melalui penyelenggaraan Lokakarya Peran Tokoh Lintas Agama menghadapi Pemilu 2004.

Lokakarya lintas agama pertama diselenggarakan pada tanggal 18-19 Pebruari 2004 di gedung LEG Mulyojati, Metro, Lampung dengan tema "Pandangan Agama-agama Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004". Pertemuan lanjutannya adalah *Workshop Voter Education* pada tanggal 20 April 2004 untuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden tahun 2004 di Graha Gading, Bandar Lampung dengan tema, "Membangun Persepsi Untuk Toleransi di Tengah Pluralitas". Melalui lokakarya tersebut mereka menginisiasi dan mendeklarasikan Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) Lampung.

Dari workshop diperoleh sebuah data berdasarkan penelitian yang dilakukan *The Asia Foundation* (TAF). Data tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan umum di Asia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama menempati urutan pertama yaitu sebesar 49 %. Melalui aktivitas lintas agama, peserta semakin disadarkan akan peran penting dan peran strategis tokoh agama dalam pemilu 2004.

## INTER-RELIGIOUS WORK FORUM (FKLA), LAMPUNG

**A**N organization to bridge diversity among the people is very important. It is important to nurture respect to each other and to create harmonious and dialogical community. The following is the profile of the forum.

FKLA emerges as an inspiration among religious leading figures (Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, and Buddhism) that dialog, communication and cooperation is important within plural and heterogeneous society. The importance of an interfaith dialogue, communication, and cooperation, beside as an attempt to maximize the roles of leading figures as well as the adherents is also to establish civil society. This is as a persuasive endeavour toward disharmony and social conflict in the name of religions that are taking place. This will deliver high social cost.

Departing from similar perspective, the Institute Percik (Salatiga), Board of NU in Lampung and South Sumatra Christian Church (GKSBS) attempt to collaborate to bridge communication by organizing workshop on the role of religious leading figures in welcoming General Election 2004.

The first interfaith workshop was held on February 18-19 2004 at LEG Mulyojati, Metro, Lampung themed on "Religions in viewing General Election in 2004". This workshop was later followed by Workshop Voter Education on April 20, 2004 for Legislative Election and Presidential Election as well as the Vice President in 2004 at Graha Gading, Bandar Lampung which was themed on "Nurturing perception for tolerance amidst Plurality". Through this workshop, they are trying to initiate and declare inter-religious work forum (FKLA) Lampung.

The workshop revealed result of a research

dialog, komunikasi dan kerjasama lintas agama merupakan sebuah keniscayaan di tengah masyarakat yang plural dan heterogen, serta menjadi upaya optimalisasi peran tokoh dan umat beragama untuk mewujudkan masyarakat sipil

### Visi dan Misi FKLA Lampung

Didasari harapan masyarakat dalam konteks pluralitas, FKLA memproyeksikan visi sebagai berikut: Terbangunnya kerjasama lintas agama dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan menuju kehidupan yang sejahtera serta toleransi antar umat beragama. Untuk mencapai visi tersebut, misi strategis FKLA adalah menumbuhkan komitmen tokoh dan aktivis keagamaan untuk menggali dan menebarkan nilai-nilai universal kemanusiaan dengan membangun komunikasi, edukasi dan advokasi mengenai pengetahuan pluralitas keagamaan dalam memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual.

### Aktivitas

Aktivitas yang telah dilakukan FKLA sejak tahun 2004-2006 secara bertahap dimulai dari mengangkat wacana pluralitas dalam hubungannya dengan pendidikan pemilih sampai dengan menggumuli seluk-beluk kelintas agama. FKLA juga membangun jejaring simpul-simpul dialog di setiap kabupaten.

- ( 1 ). Workshop Voter Education untuk pemilu legislatif tahun 2004 merupakan awal aktivitas yang melahirkan FKLA. Tema yang diusung pada saat itu, "Membangun Persepsi Untuk Toleransi di Tengah Pluralitas" diselenggarakan di Graha Gading. Tindak lanjut yang lain dalam rangka menguatkan lembaga, FKLA menyelenggarakan Workshop Voter Education untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2004. Tema yang dipilih dalam workshop tersebut "Pemilu Jujur, Adil dan Damai".
- ( 2 ). Pada tahun 2005 program berlanjut dengan diselenggarakannya seminar dengan tema "Pencegahan dan Penanganan Konflik Keagamaan". Aktivitas tersebut merupakan program kerjasama FKLA dengan IAIN Raden Intan dalam rangka menggumuli isu potensi agama-agama dalam partisipasi mengembangkan studi perdamaian. Pada tahun ini juga telah dimulai usaha-usaha untuk mengembangkan simpul-simpul dialog tokoh lintas agama dengan tema "Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Perdamaian" yang diselenggarakan di lima kabupaten. Tahun 2006 FKLA masih mengembangkan simpul-simpul di dua kabupaten. Sampai akhir tahun 2006 telah terbentuk simpul dialog di tujuh kabupaten dari sepuluh kabupaten di propinsi Lampung.
- ( 3 ). Pada tahun 2007 terdapat tiga kabupaten yang memiliki agenda Pilkada di propinsi Lampung, yakni di Kabupaten Tulangbawang, Lampung Barat dan Tanggamus. Sebagai langkah proaktif untuk dapat berpartisipasi mewujudkan Pilkada yang damai, FKLA menyelenggarakan dialog tokoh lintas agama di ketiga kabupaten penyelenggara Pilkada. Tema yang diusung FKLA dalam dialog adalah *Mewujudkan Pemilu Kepala Daerah Berkualitas, Aman dan Damai*. Dalam

conducted by The Asia Foundation that during general election in Asia the trust of the people in religious leading figures increases to 49 %. People are more aware of the strategic and important role of these figures in the general election in 2004.

### Vision and Mission of FKLA Lampung



Based on the expectation of the people under the light of pluralism, FKLA projects its vision as follows: building inter-religious cooperation in establishing peace and justice for wealthier society and religious tolerance. To achieve the vision, FKLA cultivates commitment of religious figures and activists to dig and spread universal values on humanity by developing communication, education, and advocacy of the knowledge of religious plurality in fulfilling material and spiritual needs.

### ACTIVITY

FKLA had gradually focused on discourse of plurality and its relations to education for voters as well as on understanding interfaith affairs. FKLA also nurtured dialogue networking at every sub-district.

- (1) Workshop on Voter Education for election in 2004 was the seed of FKLA. This workshop which was held at Graha Gading was themed on "building perception for tolerance among plurality". FKLA also held workshop on voter education for presidential and vice presidential election 2004 themed on "trustworthy, fair, and peaceful election".
- (2) FKLA organized a seminar on ' Preventing and Managing Religious Conflicts' in 2005. It was a team-work between FKLA and IAIN Raden Intan in investigating the possibilities of religions to develop peace studies. Attempts to develop forums of dialogue for interfaith religious figures had also been developed in the same year at 5 subdistricts which were centered on " The roles of religious figures in building unity and peace". FKLA developed similar forums in two other districts in 2006 that there were dialogue forums at seven of ten subdistricts in Lampung.



menjalankan agenda kerja tersebut setiap kabupaten menyambut dengan baik dan para koordinator lintas agama dapat mengumpulkan 30 (tigapuluh) sampai 40 (empatpuluh) tokoh lintas agama. Di kabupaten Lampung Barat para tokoh agama menemukan cara untuk berfoto dengan tertawa, mereka mengatakan: "tertawa menurut agama masing-masing" dan semua pun menyambutnya dengan tertawa gembira, ternyata berbeda agama sungguh menyenangkan. Mereka mengharapkan agar diselenggarakan dialog lintas agama kembali untuk semakin dapat menjalin tali silaturahmi. Melalui pelaksanaan program pemberdayaan tokoh lintas agama dalam Pemilu Kepala Daerah tahun 2007 ini FKLA berhasil membangun kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum, baik di Propinsi maupun di ketiga kabupaten daerah pelaksana Pemilu Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap koordinator FKLA kabupaten memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Setelah program dialog dilakukan pada kabupaten penyelenggara PILKADA, FKLA memasang 10 spanduk setiap kabupaten untuk dipasang di 10 tempat yang strategis. Ungkapan dalam spanduk diantaranya berbunyi: "Betapa Indahnya: Kemenangan tanpa Merendahkan"; "Rakyat Mendambakan Pemilu Jurdil, Aman dan Damai"; "Pilihan Boleh Beda tetapi Kita Tetap Bersaudara"; "Pemenang Sejati dalam Demokrasi adalah Masyarakat Yang Damai". Ungkapan dalam spanduk spanduk tersebut berasal dari usulan para peserta dialog dan ditujukan kepada para kandidat kepala daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih. Tentunya harapan mereka bagi dunia Pemilu tidak akan jauh dari ungkapan-ungkapan dalam spanduk tersebut. Dapat dikatakan bahwa peran pertemuan tokoh agama secara damai sedikit banyak telah menciptakan Pemilu Kepala Daerah yang damai di ketiga kabupaten di Lampung. Sekalipun ada gejolak, tetapi masyarakat telah semakin cerdas menentukan sikapnya untuk lebih dewasa terhadap perbedaan pendapat.

- (4). Pada bulan Januari tahun 2008 FKLA mengagendakan seminar dan lokakarya penyusunan anggaran dasar dan rencana kerja tahun 2008-2009 guna menjawab usulan-usulan dari simpul-simpul lintas agama agar dapat membuat payung hukum. Tema Lokakarya tersebut adalah "Meningkatkan Kesadaran dan Komitmen Tokoh Lintas Agama dalam Kebersamaan Menuju Pemberdayaan Masyarakat Sipil". Lokakarya tersebut melibatkan peran serta Dinas Sosial Propinsi Lampung dan Kesatuan Bangsa dan Politik. Topik dan nara sumber yang dipilih dalam seminar dan lokakarya dimaksudkan untuk dapat menjadi referensi yang mendorong arah jaringan kerja-sama sampai simpul di setiap kabupaten. Kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah mendapat

## Pemenang Sejati dalam Demokrasi adalah Masyarakat Yang Damai

- (3) There were three subdistricts in Lampung with regional leader election in 2007, they were: Tulangbawang, west Lampung, and Tanggamus. As a proactive way to participate in organizing peaceful Pilkada, FKLA organized a dialogue forum for interfaith leading figures at three regencies.

FKLA chose the theme on *Realizing A Qualified, Condusive, and Peaceful Regional Leaders Election*. Each of the regencies duly received this program, and the coordinators of inter-religions gathered 30 to 40 interfaith figures. Interfaith leading figures at the regency of Western Lampung even agreed on a creative way to relate one another. They jokingly said "please do smile according to your own faith" while taking picture together. Of course all of them laughed responding to this statement. It is indeed wonderful to embrace different faiths. They expected to attend another interfaith dialogue to strengthened their friendship. Through the program of empowering interfaith figures during the Regional Leaders Election in 2007, FKLA successfully build cooperation with the Commission of General Election around the Province as well as the three regencies in organizing regional-head elections. This shows that each of FKLA's coordinators in regencies are equipped with the ability to build cooperation with different groups. FKLA set 10 banners of each regencies at 10 different strategic places as the program conducted at the regencies where regional-head elections were held. The banners spoke: "The beauty of victory without humiliation", "People long for reliable, fair, and peaceful election", "Our choices are different, but we are sisters and brothers no matter what", "The real winner of democracy is the peaceful society". The statements of the banners were suggested by the participants of the dialogue and are referred to the candidates of regional leaders, organizers of the elections, and also the voters. These participants spoke their hopes for the election through the banners. In general, the peaceful meeting of interfaith figures contributed to create a peaceful regional-head elections at three regencies in Lampung. Even though there was social

sambutan baik untuk dapat meningkatkan kinerja para tokoh agama dalam membangun jejaring dengan para pihak, termasuk pemerintah. Pembentukan simpul-simpul lintas agama yang masih menyisakan dua kabupaten ditindaklanjuti pada tahun 2008. Terbentuklah simpul Bandar Lampung dan Metro pada tahun 2008. Pembentukan simpul-simpul ini secara teknis diawali dengan pengenalan, membangun harapan dan pengorganisasiannya. Namun dengan terbentuknya sepuluh simpul di sepuluh kabupaten, bukan berarti selesai apa yang menjadi agenda FKLA. Sebab pada tahun 2007 telah lahir satu kabupaten baru dan pada akhir tahun 2008 lahir 3 kabupaten baru di Propinsi Lampung. Dengan demikian masih terdapat empat kabupaten baru yang belum memiliki simpul lintas agama.

Selanjutnya FKLA bekerjasama dengan Pusat Studi Gender (PSG) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung mengembangkan simpul perempuan lintas agama yang didahului dengan seminar. Seminar pembentukan simpul perempuan mengambil tema "Peran Politik Perempuan Lintas Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Lima orang nara sumber seminar berasal dari para tokoh perempuan dari lintas agama dan satu pembicara pria menyampaikan pandangan masing-masing agama tentang peran politik perempuan. Selanjutnya dibentuklah simpul perempuan lintas agama yang dilahirkan pada tanggal 24 Mei 2008.

Untuk mengembangkan wacana lintas agama di kalangan pemuda, pada bulan Agustus 2008, FKLA menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Pemuda di Kota Metro Lampung. Tema yang diusung dalam seminar adalah "Peran Pemuda Lintas Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan di Lampung". Nara sumber dalam seminar tersebut berasal dari Departemen Tenaga Kerja Propinsi Lampung. Selain itu, hadir pula nara sumber utama yakni Sultan Hamengku Buwono X yang bersedia bertemu dengan para pemuda lintas agama dan turut menyemangati usaha yang mereka rintis. Point penting dari materi seminar Sultan di tengah-tengah konteks ketidakberdayaan dan kemiskinan adalah bagaimana berpihak terhadap yang miskin. Point ini menyadarkan semua pihak yang hadir bahwa keberpihakan menjadi komitmen penting bagi pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat beragam dan berbeda ini merupakan modal sosial bersama dalam memulihkan keadaan yang tidak berdaya tersebut.

Sementara itu untuk tahun 2009 FKLA mengembangkan program pemberdayaan simpul-simpul untuk memahami serta dapat memfasilitasi program-programnya. Program-program kerja yang strategis akan dapat menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan dalam menjawab persoalan bersama.

unrest, people are more educated and mature in coping with different voices.

- (4) On January 2008 FKLA put seminar and workshop on statues and work plan 2008-2009 on its agenda in order to respond to inputs from inter-religious forums to establish legal admission. The workshop was themed on "Raising Awareness and Commitment Among Interfaith Figures in Togetherness to Empower Civil Society". This workshop involved participants from Social Service of Lampung, politicians, and also civilians. The topic and keynote speakers for this workshop were intended to support networking to every regencies. Cooperation with governmental agencies were well welcomed with hope that it would improve performance of interfaith figures in nurturing networking with other groups, including the government. Interfaith ties were established in other 2 regencies in 2008: bandar Lampung and Metro. It started with introduction, building hopes, and organization. The establishment of interfaith forums in 10 regencies doesn't mean the end of FKLA. There were 1 new regency in Bandar Lampung in 2007 and another 3 in 2008. This means that there are 4 new regencies in need of interfaith forums.

FKLA also cooperated with Center for Gender Studies, IAIN Raden Intan, Bandar Lampung to develop interfaith women's forum which was already been started with a seminar. The seminar was themed on "Interfaith Women's Political Role in the State and National Life". There were five female speakers from the Interfaith Women's Forum and one male speaker presented their perspectives on religion and women's political role. Furthermore, an Interfaith Women's Forum was birth on May 24, 2008.

keberpihakan menjadi  
komitmen penting bagi  
pemulihan dan  
pemberdayaan masyarakat.

To develop interfaith discourse among the youth, FKLA organized youth seminar and workshop at the city of Metro Lampung in August 2008. It was themed on "The Role of Interfaith Youth in Coping with Poverty in Lampung". Keynote speakers for this seminar were from the Department of

## Masyarakat dan FKLA

Dua cerita dari simpul FKLA tentang tanggapan masyarakat lintas agama dapat menjadi petunjuk sederhana bahwa FKLA telah menjadi bagian dari gerakan yang membangun kedekatan di antara keberagaman anggota masyarakat. Pertama, inisiatif dari simpul lintas agama di kabupaten Tulangbawang yang menjembatani masyarakat di desa Moro-moro dengan pemerintah untuk mengurangi tingkat ketegangan. Kedua, inisiatif dari simpul pemuda untuk berkoordinasi menghadapi situasi sosial di wilayah Lampung Timur.

Selain kedua cerita di atas, adanya peserta-peserta seminar yang merekomendasikan agar gerakan-gerakan lintas agama seperti yang dilakukan dalam seminar-seminar semakin diperbanyak, telah mengisyaratkan bahwa pendekatan yang dikerjakan oleh FKLA diharapkan terwujud, bahkan simpul kabupaten berkeinginan untuk mengembangkan model-model dan isu dialog sebagaimana yang telah dilakukan FKLA sampai ke tingkat kecamatan.

Tentu saja hal ini semakin meyakinkan dan sekaligus mendorong FKLA untuk memberdayakan jejaring kerjanya. Oleh karena itu program pemberdayaan jejaring lintas agama menjadi prioritas program sampai tahun 2010. Untuk dapat melakukan kerjanya, FKLA harus juga semakin dapat melibatkan para pihak dari masyarakat serta lembaga-lembaga agama untuk dapat ikut serta berpartisipasi mendukung kinerja dengan cara terlibat dan menjadi jejaring.

## Harapan FKLA untuk Pemilu 2009

Agenda-agenda *voter education* telah mengawali terbentuknya FKLA pada tahun 2004. Selanjutnya FKLA juga telah mempersiapkan masyarakat pemilih mengawal proses Pemilu Damai Kepala Daerah di tiga Kabupaten tahun 2007. Di samping itu, FKLA bersama dengan PSG IAIN Radin Intan telah mempertemukan para tokoh perempuan lintas agama sampai terbentuknya simpul perempuan lintas agama.

Dengan aktivitas FKLA yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pemilih yang rasional, FKLA mempunyai tiga harapan: pertama, agar masyarakat pemilih semakin cerdas dalam memilih dan menyadari bahwa kemenangan yang sejati dalam masyarakat demokratis adalah masyarakat yang tetap menjaga perdamaian. Kedua, pihak yang menjadi penyelenggara Pemilu dapat memelihara kejujuran dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Ketiga, para calon legislatif dapat mengembangkan nilai sportivitas dan tetap dapat memberikan dukungan kepada mereka yang memang layak duduk sebagai wakil rakyat. (Anwar)



Manpower of Lampung. Sultan Hamengku Buwono X was also present as a speaker. He was willing to meet young people and support their efforts. His main point during the presentation was on taking side of the poor. This reminded all people that taking side on the poor is important to empower our society. This diverse and plural society is our social modal to develop.

In 2009, FKLA will develop programs to empower and facilitate the forums. Strategic programs will be strengths to respond to our social problems.

## FKLA and the People

Interfaith communities' comment on FKLA is a sign that it is becoming a movement that builds close relations among the diversity of the people. This is reflected from: first, the initiative of inter-religious tie at the regency of Tulangbawang that bridges the people of Moro-moto with the government to reduce tension. Second, the initiative of the youth tie to coordinate together to deal with social issues around Eastern Lampung.

Beside the two stories, the presence of seminar participants who recommend to develop interfaith movements as they encounter during attending seminars is also a sign showing the success of FKLA in approaching the people. There are even groups around the regency attempt to develop the models and issues of dialogue FKLA has been promoting.

This assures FKLA as well as supports is to empower its networking groups. For this reason, empowering inter-religious networking will be its priority until 2010. However, it is very important that FKLA invites various community groups and also religious institutions to participate in its networking that its work is fulfilled.

## What FKLA hopes for Election 2009

The agendas of *voter education* had been the seed to begin FKLA in 2004. FKLA continually prepared voters to watch over the process of peaceful regional leaders election in three regencies in 2007. Besides, FKLA in cooperation with PSG IAIN Radin Intan organized a forum for interfaith female figures to meet together which later resulted in forming an Interfaith Women's Forum.

FKLA embraces three hopes in relation to its programs to empower people to be rational voters: first, that people will be more educated in choosing and realizing that real victory in a democratic society is when they can uphold peace. Second, the parties who organize the election will be able to promote honesty with respect for democratic values. Third, legislative candidates can raise sportmanship values and continually support those who will be elected as the representatives of the people. (Anwar)

## AGAMA BERPERSPEKTIF KORBAN

Isa Abdurrahman

*"Kami mengakui, bahwa negara telah bertindak kejam terhadap hak asasi manusia. Maka sekarang kami lakukan (pengakuan) agar sejarah yang menyedihkan yang pernah kita alami itu tidak terulang."*  
(Alfonso Portillo, Presiden Guatemala)<sup>1</sup>

HAMPIR lima tahun, pembunuhan terhadap Munir belum juga mendapatkan jalan untuk keadilan. Sebagaimana tragedi kemanusiaan yang senantiasa terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, saat ini ada korban yang sangat jelas namun tanpa pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan hukuman. Pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pengusutan kasus pembunuhan Munir merupakan ujian bagi sejarah bangsa (*test of our history*), masih menantikan wujud konkretnya. Apabila seorang Munir yang dihormati oleh dunia internasional saja dapat diperlakukan sewenang-wenang, bagaimana dengan para pembela HAM yang lainnya, bagaimana pula dengan warga negara yang sehari-harinya tak pernah terdengar dalam berita. Kasus Munir ini menunjukkan bahwa otoritas negara dalam melindungi para pembela HAM masih sangat lemah dan justru sebaliknya aparat negara sering bertindak menghambat dan menebar ancaman atas kerja-kerja mereka.<sup>2</sup>

Penghilangan orang, tindak kekerasan, dan pembunuhan adalah pelanggaran HAM yang bobotnya sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius dan seksama. Namun anehnya, selama masa pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2009 ini, tema penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, sama sekali tidak terdengar. Bahkan setelah para pekerja HAM dan keluarga-keluarga korban mempertanyakan soal penuntasan kasus pelanggaran HAM ini, tak juga terdengar sedikitpun respon dari para kandidat presiden. Apakah tema tentang penuntasan kasus pelanggaran HAM di tanah air ini membahayakan kalkulasi pendukung para kandidat presiden? Apakah komitmen untuk

<sup>1</sup>.Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto, Elsam, September 2004, Cetakan kedua, hlm. Xxvii-xxviii

<sup>2</sup>.Lih. Asmara Nababan, dalam kata pengantar *Perlindungan terhadap Human Rights Defenders*, Imparsial, 2005, hlm.viii-ix

## RELIGIONS THROUGH THE EYES OF THE VICTIMS

By: Isa Abdurrahman

*"We confess that the nation has violated human rights. This confession is that the same grievous history will not repeat"*  
(Alfonso Portillo, the President of Guatemala)

IT'S been almost five years, yet the case of Munir's murder hasn't been brought to justice. Similar to previous human tragedies, there are clearly victims who suffer but no obvious perpetrators from whom responsibility can be demanded. President Susilo Bambang Yudhoyono's statement that the investigation of Munir's murder is a test of our history still needs to be fulfilled. If Munir who was internationally respected suffered such a cruel fate, what will happen to human rights defenders and also ordinary civilians? The case of Munir reflects the flimsiness of the authority of the state in protecting human rights activists. Its agencies often hinder the process of human rights enforcement and even infringe upon these rights.<sup>1</sup>

People disappearing, violence, and murder are human rights violations that need serious attention. However, these issues are contradictory to the presidential election in 2009 where issues of human rights violations in Indonesia are not thoroughly discussed. None of the presidential candidates have responded to human rights defenders and family members of the victims who are questioning the resolution of the cases. Is the theme of human rights violations in Indonesia threatening the number of supporters for the presidential candidates? Will being committed to investigating human rights violations disgrace the president as was experienced by ex-President Abdurrahman Wahid when he publicly apologized for the murder of those who were condemned communists and thus proposed to extract TAP MPRS No. XXV/1966 as an attempt to promote justice for the victims? There is no clear answer to these questions.

There is hope among the people that whoever will be elected as the President of the Republic of Indonesia this year will have a mandate to deal with human rights violations thoroughly. All adherents of religions in Indonesia are also obliged to encourage the respect and defense of human rights

<sup>1</sup>.Asmara Nababan, in his introduction to *Perlindungan terhadap Human Rights Defenders*, Imparsial, 2005, page.viii-ix

menuntaskan kasus pelanggaran HAM ini akan menjatuhkan tahta kepresidenan sebagaimana dialami oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada masa lalu karena mengungkapkan permohonan maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis dan mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. XXVI/1966 sebagai upaya memberikan keadilan kepada para korban? Tak tahulah, apa jawabnya.

Dalam lubuk hati rakyat Indonesia, siapapun yang terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum langsung tahun ini, memiliki mandat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Seluruh masyarakat beragama di Indonesia memiliki kewajiban juga untuk senantiasa berupaya agar hak asasi manusia di negeri ini semakin mendapatkan jaminan perlindungan dan penghormatan oleh negara. *Asghar Ali Engineer*, salah seorang pemikir Islam, menyatakan bahwa Allah, melalui Nabi, memperbolehkan perang melawan ketidakadilan atau *zulm*. Ini dinyatakan terutama ketika manusia mengalami penganiayaan, eksploitasi, penindasan dan perampasan hak. Allah menyeru, "Ketika semua ini terjadi di sekitarmu, di kotamu, di negaramu atau di bumi ini, bagaimana mungkin kamu bisa membiarkan struktur sosial dan politik yang menindas ini? Mengapa kamu tidak melawan? Bagaimana mungkin kamu akan mengaku sebagai hamba-Ku yang beriman? Jika kalian adalah hamba-hamba-Ku yang beriman, kalian harus menghapuskan penindasan. Aku berjanji untuk menjadikan kalian yang lemah dan tertindas (*mustad'ifin*) sebagai pewaris bumi dan pemimpin dunia."<sup>3</sup>

Otoritas negara dalam melindungi para pembela HAM masih sangat lemah dan justru sebaliknya aparat negara sering bertindak menghambat dan menebar ancaman atas kerja-kerja mereka

in this country. *Asghar Ali Engineer*, a Moslem thinker, states that Allah, through the prophets, allows war to combat injustice or *zulm*. This occurs particularly when people are oppressed, exploited, suppressed, and have their basic rights violated. God states, "When all of this happens around you, in your city, in your country or wherever on the earth, how can you just be quietly witnessing the oppressive social and political structure? Why don't you resist it? How can you still call yourself my faithful disciples? You have to eliminate oppression. I promise you who are weak and oppressed (*mustad'ifin*) will inherit the earth and lead the world."<sup>2</sup>

*Asghar Ali Engineer's* quotation is a real portrait of religious solidarity for the victims or religions through the eyes



<sup>3</sup>. *Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta 2000, cetakan II, hlm.313-314

<sup>2</sup>. *Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta 2000, second edition, page.313-314

Apa yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer ini merupakan gambar nyata dari solidaritas agama terhadap para korban atau agama yang berperspektif korban, yakni agama yang mengakui, menyelami, menghormati dan membela korban yang mengalami penindasan serta perampasan hak asasinya. Agama yang berperspektif korban adalah agama yang berpegang pada prinsip kesucian kehidupan dan martabat manusia. Ini berarti bahwa agama-agama yang demikian ini tidak dapat berdiam diri terhadap segala bentuk pembiaran negara atas segala tindakan yang menodai kesucian kehidupan dan martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia pasca pemilihan Presiden, masyarakat beragama mendapatkan tugas yang sangat besar dalam mengawal perwujudan perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih berserakan dan belum mendapatkan penuntasan serius. Para pembunuh Munir masih bebas melenggang. Mereka yang menghilangkan Wiji Thukul masih belum tersentuh hukum dan pengadilan. Mereka yang menembak mati para mahasiswa belum jelas rimbanya. Kesucian hidup dan martabat manusia yang dijunjung oleh agama-agama masih sangat rentan untuk direndahkan. Secara praktis, kotbah-kotbah di mimbar agama-agama musti lebih mendorong pihak negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia daripada menggambarkan ketakutan-ketakutan suasana neraka. Pendidikan-pendidikan keagamaan semestinya diarahkan kepada cara berpikir dan cara bertindak yang mendorong sikap kritis terhadap segala bentuk pembiaran atas tindakan pelanggaran harkat dan martabat kemanusiaan daripada memproduksi prasangka antar kelompok.

Ketika seluruh masyarakat beragama di Indonesia bergandengan tangan menyuarakan kemendesakan jaminan keadilan bagi para korban dan secara tegas menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagai hal yang tidak dapat ditawar, dapat diharapkan bahwa pada suatu ketika negara mengakui kesalahannya karena tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya, dan memberikan jaminan bahwa pada masa depan tindakan pelanggaran itu tidak akan terulang lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Alfonso Portillo, presiden Guatemala, yang pernyataannya dikutip di sini.[]

**A g a m a y a n g berperspektif korban adalah agama yang berpegang pada prinsip kesucian kehidupan dan martabat manusia.**

of the victims, religions which admit, respect, defend, and are seen by those who are oppressed and whose rights are violated. Religions through the eyes of the victims are religions that hold on to the purity of life and human dignity. This means that such religions can no longer be silent toward all forms of the state's ignorance of all abuses that violate the purity of life and human dignity.

Within the context of Indonesia post-presidential election, religious communities are entrusted with the important task of safeguarding the process of human rights defense by the state. Cases of human rights violations are still emerging and ignored. The murderers of Munir are still free. Those who made Wiji Thukul disappear are still free from the law as well as justice. There is still isn't a clear answer to where those who shot university students are. The purity of life and human dignity which religions revere is in a fragile condition. Practically, sermons must encourage the state to solve incidents of human rights violations instead of reflecting on eternal damnation. Religious education must help be critical of all forms of ignorance, human rights violations and dignity, and not encourage people to be biased between groups.

When all religious communities in Indonesia join hands in advocating for Justice for all of the victims of human rights violations, it will be possible that one day the state will confess its fault for being unable to protect the rights of its citizens and will guarantee that the same transgression will not happen again as is reflected by Alfonso Portillo's statement quoted here.[]

## 1. GENDER, AGAMA DAN BUDAYA: PENGALAMAN INDIA DAN INDONESIA

**K**EGIATAN ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan kunjungan Direktur Eksekutif Henry Martyn Institute, Hyderabad, India, Dr. Andreas D'Souza. Acara ini dilakukan pada hari Kamis, 5 Februari 2009 di Kantor Institut DIAN/Interfidei. Beberapa kelompok dan mitra kerja Interfidei dari Jaringan Perempuan Jogja, PKBI, IDEA, serta beberapa aktivis perempuan diundang menghadiri acara ini. Dalam sharing ini, Dr. Andreas D'Souza membagikan pengalaman seputar gender, agama dan budaya dalam konteks India. Beliau menuturkan bahwa kesetaraan gender di India masih merupakan sebuah perjuangan yang panjang dan menantang, karena masih ada praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan, baik dalam ranah budaya maupun agama. Dalam ranah agama, diskriminasi perempuan terjadi karena persoalan tafsir terhadap doktrin agama yang seringkali menempatkan kaum perempuan sebagai subordinat dari kaum laki-laki dan mempunyai dampak yang serius terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Dalam ranah budaya, perjuangan menuju kesetaraan gender sering berbenturan dengan tradisi patriarkat dan stratifikasi masyarakat berdasarkan kasta-kasta yang masih sangat kuat di India. Hal ini terlihat jelas, antara lain minimnya pilihan bebas kaum perempuan dalam hal pernikahan yang ditunjukkan oleh banyaknya praktik perjdodohan, pernikahan di bawah umur, poligami dan poliandri. Dalam situasi ini, Henry Martyn Institute tak henti-hentinya turut memperjuangkan kesetaraan gender lewat program-program konkret yang dilakukan. Rekan-rekan dari Jaringan Perempuan Jogja juga membagi pengalaman mereka berdasarkan apa yang mereka geluti selama ini tentang perjuangan menuju kesetaraan gender. Ternyata, posisi dan kondisi kaum perempuan di Indonesia juga kurang lebih mengalami situasi yang sama dengan yang dialami kaum perempuan di India. Ada banyak contoh kasus, dimana, baik dalam ranah budaya maupun agama, kaum perempuan sering mengalami perlakuan diskriminatif dan itu terasa juga dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat Indonesia.

## 2. "A Common Word between Us and You" Landasan Dialog dan Kerjasama Kristen-Muslim seluruh dunia

Diskusi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Februari 2009 di Kantor Interfidei dengan mengundang 31 intelektual Yogyakarta dari berbagai agama. "138 tokoh Islam sedunia menulis dalam surat mereka yang disebut "A Common Word", kepada umat Kristen, bahwa perdamaian dunia harus dimulai dengan perdamaian di antara orang Muslim dan orang Kristen sendiri. Lebih dari 300 pemimpin Kristen merespon positif surat tersebut. Mereka menyusun dan menandatangani surat balasan dan mengirimkannya kepada para pemimpin umat Islam", demikian, komentar awal pada dokumen ini. Dalam diskusi ini, masing-masing peserta menyadari perlunya

## 1. GENDER, RELIGION, AND CULTURE: EXPERIENCE OF INDIA AND INDONESIA

**T**HIS program is one of the series of activities during the visit of Dr. Andreas D' Souza, the Executive Director of Henry Martyn Institute, Hyderabad, India. It was a discussion held on Thursday, February 5<sup>th</sup>. 2009 at DIAN/Interfidei office. Interfidei invited some of its partners, activists, as well as other groups such as Jaringan Perempuan Jogja, PKBI, and IDEA to join the discussion. Dr. Andreas shared his experience and struggle, knowledge on gender, religious, and cultural issues in India. According to him, gender equality in India is challenged and needs long struggle since discrimination toward women both culturally and religiously is still obvious everywhere. Under the context of religion, discrimination toward women exists because of doctrinal interpretation which often treats women as subordinate to men and thus greatly impacts on social relation between women and men. The struggle for gender equality often collides with tradition, patriarchy, and social stratification based on caste that is still very strong in India. This is obviously seen from the limited chance for women to exercise their freedom in marriage as a result of match-making, under-age marriage, polygamy, and polyandry. The Henry Martyn Institute unceasingly speaks for gender equality through its concrete programs. At the same time, our partners from Jaringan Perempuan Jogja also had opportunity to share their experience in struggling for gender equality in Indonesia. It is noted that women's position and condition in Indonesia are more or less the same with India. There are many cases where women suffer from discrimination culturally as well as religiously, and these are reflected in the social, political, and communal life in Indonesia.

## 2. "A Common Word between Us and You": Foundation of Muslim-Christian Dialogue and Cooperation Around the World

The discussion, held on Saturday on 7 February 2009 at DIAN/Interfidei office, was attended by 31 intellectuals from various religious backgrounds in Yogyakarta. 138 Muslim prominent figures in the world wrote letters for Christians, compiled as "A Common World" to propose that world peace should begin from the peace between Muslims and Christians. There were more than 300 Christian leaders responded to the letters positively. "They wrote and signed response letters and sent them to the Muslim leaders" a comment on the introductory part of this document. During the discussion, each person realized the importance to understand similarities and

pemahaman terhadap berbagai persamaan dan perbedaan yang ada pada masing-masing agama. Dokumen ini menunjuk dan mengajak kita semua, terlebih umat Islam dan Kristen untuk menemukan "sebuah kata bersama", yang dapat menjadi jembatan menuju perdamaian dunia. Kendati, ada banyak hal yang "tidak persis sama", tetapi ada niat baik dan usaha untuk memandang agama-agama sebagai kekuatan yang dapat mendorong terciptanya perdamaian dunia, dari pada sebaliknya. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi dokumen hidup yang perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan bersama di tengah ragam perbedaan agama yang ada di Indonesia.

### 3. Workshop Internal Staf Interfidei Tentang Konflik dan Transformasi Sosial.

Bertindak sebagai fasilitator dalam *training* ini adalah Dr. Andreas D'Souza di Kantor Interfidei dengan peserta seluruh staf Interfidei. Acara ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 24 - 26 Februari 2009. Hari pertama, pelatihan diorientasikan kepada proses membangun *self esteem, respect to the other in team*, membangun kepercayaan diri dan saling percaya serta membangun sikap positif. Hari kedua, tema utamanya adalah membangun Visi bersama dan membangun relasi yang positif, saling percaya, terbuka, jujur dan konstruktif. Setiap orang atau lembaga mempunyai visi. Seringkali, dalam meng-aplikasikan visi tersebut ada saja tantangan yang dihadapi dan bias menimbulkan konflik, baik dengan diri sendiri, dengan lembaga dan dengan orang lain. Bagaimana menjadikan konflik sebagai sebuah dinamika positif untuk membangun perdamaian demi kemajuan pribadi dan lembaga. Hal yang penting adalah mampu mengelola konflik pribadi dengan diri sendiri, dengan anggota keluarga dan dengan sesama rekan kerja. Hari ketiga, tema utamanya adalah membangun kepercayaan satu sama lain dalam situasi apapun demi tujuan bersama serta pemahaman tentang konflik. Konflik dapat membawa perubahan yang baik, namun konflik yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan kekerasan. Konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan dalam hidup kita, karena masing-masing kita berbeda kepentingan. Terdapat beragam cara dan strategi mengelola konflik yang produktif.[]

differences among religions. This document shows and invites everyone, Muslims and Christians in particular, to search for a 'common word' to be bridge to peace. Even though there are many 'different aspects' among the two but there is one similar intention to nurture religion as a strength to promote world peace. This document is hoped to be a life document to conduct amidst plural life in Indonesia.

### 3. Internal Workshop on Conflict and Social Transformation for Interfidei's Personnel

The training, held at the office of Interfidei, was facilitated by Dr. Andreas D' Souza and attended by all Interfidei's personnel. It was three days training, from 24-26 February 2009. The first day of training emphasized the process to build self esteem, to respect the other team, to raise self trust and trust among others and also to nurture positive attitude. The second day centered around building vision as a group and also building positive relationship, mutual trust, openness, honesty, and constructive attitude. Every single individual as well as institution owns a vision. However, most of the times challenges emerge to face and they are potential to raise bias within oneself as well as with others. How to foster conflict as a positive dynamic to build peace for everybody's good and also the institution? It is important to be able to manage personal conflict with oneself, family members, and with colleagues at work. The third day emphasized on building trust one another in any condition for common goal and also on understanding conflict. Conflict may bring positive change, but unmanaged conflict can result in violence. Conflict is unavoidable in life because everyone has her/his own interest. Nevertheless, there are many ways and strategies to manage conflicts to be productive.[]

## Yayasan Dian/Interfidei Dian/Interfidei Foundation

Board Members: Djohan Effendi, Daniel Dhakidae, Zulkifli Lubis; Executive Board: A. Elga J. Sarapung (Director), Indro Suprobo (Vice Director), Ira Sasmita (Secretariate); Eko Putro Mardiyanto (Finance); Department Coordinators: Elga Sarapung (Education/Networking/Library/Documentation/Research); Indro Suprobo (Publication/Institution/Fundraising/HRD); Triny Rettob (Household); Staffs: Sarnuji, Frans Lambut, Margareth Aritonang, Khairul Anwar, Susanto, Alfiat; Address: Jl. Banteng Utama 59, Perum. Banteng Baru Yogyakarta, 55581-Indonesia, Ph.: 0274-880149, Fax.: 0274 -887864, E-mail :[dianinterfidei@yahoo.com](mailto:dianinterfidei@yahoo.com). Website:<http://www.interfidei.or.id/>; No.Rek: Yayasan DIAN-Interfidei, Bank BNI Cabang UGM, Capem Pasar Colombo, No. 0039234672.

Demi Pengembangan Newsletter ini, kami terbuka terhadap saran dan kritik anda.  
*We are open to Suggestions and criticisms in order to improve this Newsletter.*